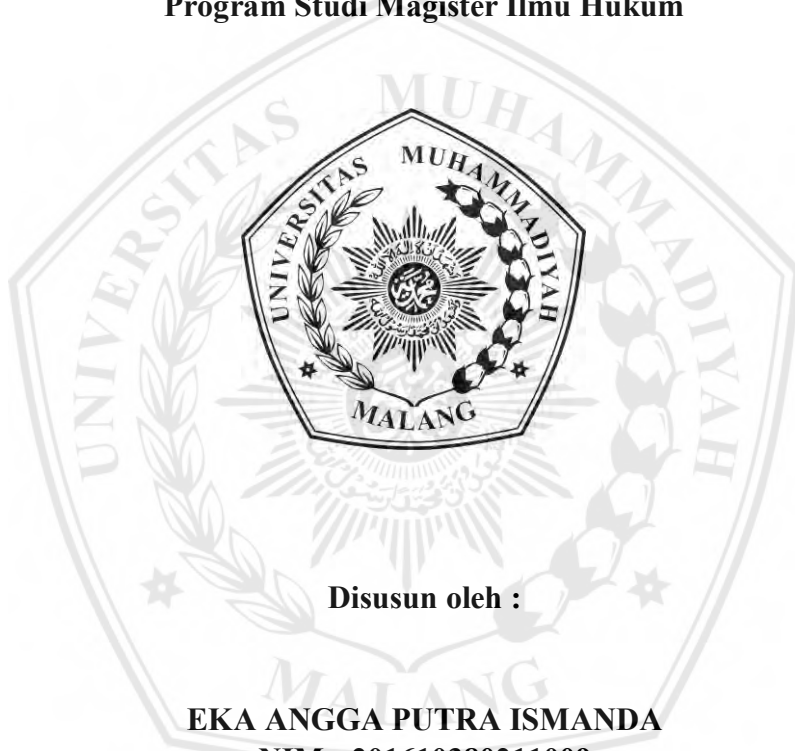


**ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT
PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA
KEPADA PIHAK KETIGA
(Studi di FIFGROUP Finance Cabang Malang 2 Singosari)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Disusun oleh :

**EKA ANGGA PUTRA ISMANDA
NIM : 201610380211009**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
April 2020**

**ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT
PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA
KEPADA PIHAK KETIGA
(Studi di FIGROUP Finance Cabang Malang 2 Singosari)**

Diajukan oleh :


**EKA ANGGA PUTRA ISMANDA
201610380211009**

Telah disetujui
Pada hari/tanggal, Rabu 8 April 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Rahayu Hartini, SII., M.Si., M.Hum

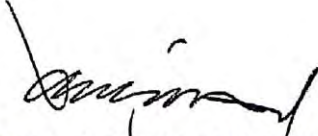

Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Magister Pendidikan Matematika



Prof. Akhsanul In'am, Ph.D


Mokh. Najih, SH., MH., Ph.D

TESIS

EKA ANGGA PUTRA ISMANDA
201610380211009

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Rabu/8 April 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini
Sekretaris : Dr. Fifik Wiryani
Penguji I : Dr. Sulardi
Penguji II : Dr. Herwastoeti

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugerahNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **"ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA (Studi di FIFGROUP Finance Cabang Malang 2 Singosari)"**. penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. dan saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama menyelesaikan tesis ini, maka tesis ini tidak akan mungkin dapat penulis selesaikan dengan baik. oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya kepada para pihak :

1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Akhsanul In'am, Ph.D. selaku Direktur program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Dr. Mokhamad Najih, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
5. Ibu Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum, selaku dosen pembimbing Tesis II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. Sulardi, SH., M.Si dan Ibu Dr. Herwastoeti, SH., M.Si, selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik untuk perkembangan tesis saya kedepan.
7. Seluruh dosen dan staf administrasi TU (tata usaha) pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
8. Orang tua tercinta yang telah memberikan doa dan motivasi selama bimbingan dan penyusunan tesis.

9. Istri tercinta yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga, dan
10. Seluruh rekan-rekan Magister Ilmu Hukum yang telah saling mendukung, memotifasi, serta menyumbangkan pikiran untuk melalui perjuangan bersama.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi maupun instansi pendidikan lain.

Malang, 8 April 2020

Penulis

Eka Angga Putra Ismanda



DAFTAR ISI

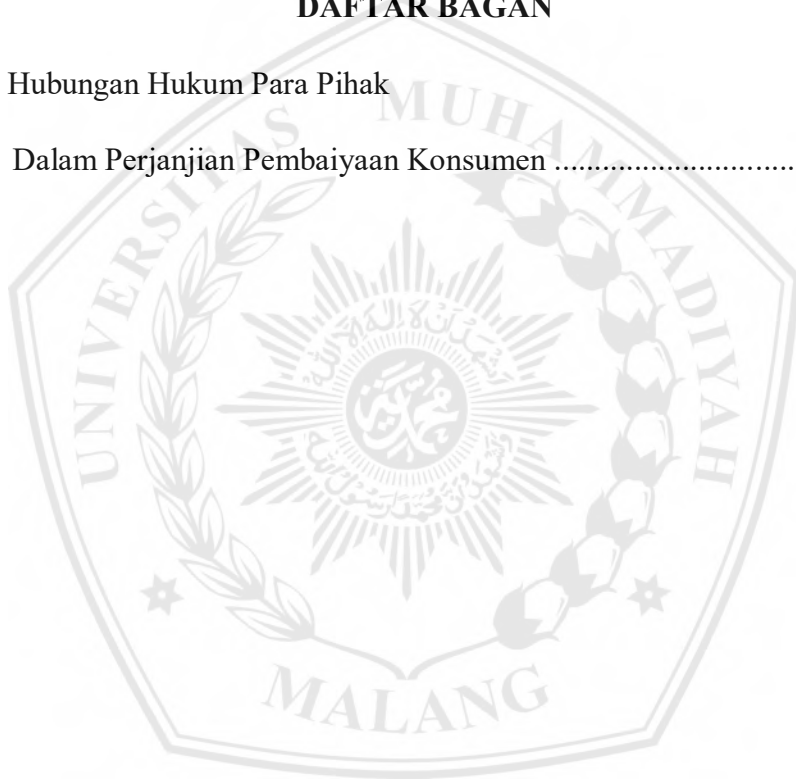
Kata pengantar	i
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Surat pernyataan originalitas	vi
Abstrak	vii
Abstrack	viii
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	2
Penyelesaian Permasalahan Hukum Jaminan Fidusia (litigasi dan non litigasi)	3
Metode penelitian	4
Sumber data	5
Teknik pengumpulan data	5
Hasil penelitian dan pembahasan	
Hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen diFIFGROUP.....	6
Permasalahan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di FIFGROUP.....	15
Penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam hal obyek jaminan dialihkan kepada pihak ketiga.....	18
Kesimpulan.....	31
Saran.....	33
Daftar Pustaka.....	34
Lampiran.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia	17
Tabel 2 : Biaya Pembuatan Sertifikat Jaminan Fidusia	18
Tabel 3 : Penyelesaian Permasalahan Hukum	26
Tabel 4 : Uji Materi Undang Undang Jaminan Fidusia	27

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Hubungan Hukum Para Pihak	
Dalam Perjanjian Pembaiyaan Konsumen	6



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Aplikasi Form Pengajuan Kredit
- Lampiran 2 : Surat Persetujuan Suami/Istri
- Lampiran 3 : Surat Perjanjian Pembiayaan
- Lampiran 4 : Surat Persetujuan Pembiayaan
- Lampiran 5 : MOU FIFGROUP dengan Deler
- Lampiran 6 : Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia
- Lampiran 7 : MOU FIFGROUP dengan Notaris
- Lampiran 8 : Akta Notariil Jaminan Fidusia
- Lampiran 9 : Sertifikat jaminan fidusia
- Lampiran 10 : Surat Somasi
- Lampiran 11 : Surat pernyataan debitur yang menggadaikan motor
- Lampiran 12 : Surat kuasa penarikan obyek jaminan
- Lampiran 13 : Foto proses Perjanjian Kredit
- Lampiran 14 : Foto proses negosiasi (kreditur dan debitur)
- Lampiran 15 : Foto penarikan obyek jaminan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **EKA ANGGA PUTRA ISMANDA**

NIM : 201610380211009

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **TESIS** dengan judul : **ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA** (Studi di FIFGROUP Finance Cabang Malang 2 Singosari) Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 April 2020

Yang menyatakan,



EKA ANGGA PUTRA ISMANDA

ABSTRAK
ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT
PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA
KEPADA PIHAK KETIGA
(Studi di FIFGROUP Finance cabang Malang 2 Singosari)

Eka Angga Putra Ismanda
Nim : 201610380211009
Email : angga_ismanda@yahoo.co.id

Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum
NIDN : 26036301
Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum
NIDN : 0028056701

Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan obyek jaminan fidusia, Apabila larangan tersebut dilanggar, Debitur dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Implementasinya banyak obyek jaminan fidusia yang sudah dialihkan ke pihak ketiga berdasarkan (Indri Yunita:2010) dan (Leonard Charles Wahyu Wibowo:2010). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum para pihak, permasalahan pengalihan obyek jaminan Fidusia, dan penyelesaian permasalahan hukumnya. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Terdapat (6) enam hubungan hukum dalam Pembiayaan Konsumen di FIFGROUP, yaitu: perjanjian pembiayaan konsumen; perjanjian jual beli kendaraan bermotor antara FIFGROUP dengan Dealer, Perjanjian jual beli bersyarat antara FIFGROUP, Dealer dan Debitur, Perjanjian jaminan fidusia, MoU antara FIFGROUP dengan Notaris, serta kuasa untuk eksekusi obyek jaminan fidusia. Permasalahan hukum perjanjian pembiayaan konsumen di FIFGROUP adalah kredit macet, obyek jaminan dalam keadaan tidak terawat, dan mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Penyelesaian kredit macet (Jika Debitur tidak membayar angsuran dan denda selama 2 bulan atau lebih), dilakukan dengan eksekusi obyek jaminan fidusia. Penyelesaian permasalahan hukum terkait obyek jaminan dalam keadaan tidak terawat adalah Debitur harus memperbaiki obyek jaminan dan selanjutnya Kreditur Bersama Debitur melakukan penjualan di bawah tangan. Penyelesaian permasalahan pengalihan obyek jaminan fidusia adalah pelaporan tindak pidana atau eksekusi obyek jaminan fidusia yang kemudian dilakukan penjualan secara dibawah tangan.

Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan, Jaminan Fidusia, Pengalihan Obyek

ABSTRACT
ANALYSIS OF COMPLETION OF LEGAL PROBLEMS RELATING
TO THE TRANSFER OF FIDUCIARY GUARANTEE
OBJECTS TO THIRD PARTY
(Study at FIFGROUP Finance Malang 2 Singosari branch)

Eka Angga Putra Ismanda
Nim : 201610380211009
Email : angga_ismanda@yahoo.co.id

Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum
NIDN : 26036301
Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum
NIDN : 0028056701

Based on Article 23 paragraph 2 of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guarantees Debtors are prohibited from transferring, mortgaging, and renting out fiduciary security objects. If the prohibition is violated, the Debtor may be subject to civil or criminal sanctions. The implementation of many fiduciary security objects has been transferred to third parties based on (Indri Yunita: 2010) and (Leonard Charles Wahyu Wibowo: 2010). This study aims to determine the legal relationship between the parties, the problem of transferring the object of the Fiduciary guarantee, and the resolution of the legal problem. This research method uses empirical juridical methods, with primary and secondary sources of legal material. Data collection is done through interviews, observations, and documentation. Then analyzed descriptively qualitative. There are (6) six legal relationships in Consumer Financing at FIFGROUP, namely: consumer financing agreements; sale and purchase agreement of motor vehicles between FIFGROUP and Dealers, conditional sale and purchase agreement between FIFGROUP, Dealers and Debtors, fiduciary guarantee agreement, MoU between FIFGROUP and Notary, and power of attorney to execute fiduciary security objects. The legal issues in the consumer financing agreement at FIFGROUP are bad loans, objects of collateral in an untreated state, and transfer of fiduciary objects to third parties. Settlement of bad debts (If the Debtor does not pay installments and fines for 2 months or more), is carried out with the execution of fiduciary collateral objects. Settlement of legal issues related to collateral in an untreated state is the Debtor must repair the collateral object and subsequently the Joint Creditors make the sale underhanded. The solution to the problem of transferring fiduciary guarantee objects is the reporting of criminal acts or execution of fiduciary collateral objects which are then sold under the hand.

Keywords: Financing Agreement, Fiduciary Guarantee, Transfer of Objects

Latar Belakang

Tahap awal tentang proses perjanjian jaminan fidusia yaitu calon debitur melakukan pengajuan kredit sepeda motor ke dealer. Setelah adanya laporan dari pihak dealer mengenai pengajuan kredit tersebut, pihak *surveyor* selaku karyawan kreditur bertugas untuk melakukan verifikasi data calon debitur di rumahnya. Pengajuan yang sudah disetujui maka dealer berkewajiban untuk melakukan pengiriman kendaraan ke rumah debitur. Timbulah hak dan kewajiban bagi debitur, kreditur, dan dealer karena telah terjadi hubungan hukum yang terikat dalam perjanjian jaminan fidusia. Pihak kreditur mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran angsuran secara berkala dari debitur. Sedangkan, debitur berhak untuk menerima kembali surat kepemilikan kendaraan yang dijaminakan apabila seluruh tanggungan hutang debitur telah lunas. Sementara, pihak dealer mempunyai hak untuk memperoleh pencairan uang pembelian kendaraan bermotor dari kreditur.

Salah satu bentuk cidera janji dalam perjanjian jaminan fidusia adalah pengalihan obyek jaminan fidusia dari debitur ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Selagi, surat kepemilikan kendaraan masih berada di tangan kreditur dengan artian bahwa kredit belum lunas maka, debitur dilarang untuk mengalihkan obyek jaminan fidusia ke tangan orang lain dalam kondisi apapun. Pemberi fidusia wajib merawat obyek jaminan fidusia sebaik mungkin dan pemberi fidusia wajib menyerahkan surat kepemilikan kendaraan apabila prestasi pemberi fidusia sudah terpenuhi. Pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia telah melanggar Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pasal 23 ayat 2

"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia."

Sebagai contoh kasus pengalihan obyek jaminan fidusia pernah diteliti oleh Sri Purwaningsih alumni Universitas Diponegoro Semarang Program Studi Magister Kenotariatan dengan judul tesis "Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang dijual kepada pihak ketiga (studi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)" yang pada intinya beliau menjelaskan tentang

1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor, pada dasarnya kreditur akan menilai layak atau tidak pengajuan kredit yang dilakukan debitur.
2. Perlindungan hukum bagi kreditur jika obyek jaminan fidusia dijual kepada pihak ketiga. dengan sudah memegang sertifikat jaminan fidusia, maka perlindungan hukum sudah didapat oleh kreditur dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia.¹

Sanksi perdata yang timbul terhadap obyek jaminan fidusia dialihkan adalah debitur dapat dikenai biaya ganti rugi sesuai dengan keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan. ganti rugi yang dimaksud adalah dengan cara membayar semua tunggakan hutang di kreditur. apabila, sanksi tersebut tidak dijalankan oleh debitur maka, pihak kreditur berhak untuk melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia dengan berpegang teguh pada sertifikat jaminan fidusia. selain sanksi perdata, debitur juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi "pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)."²

Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen?
2. Bagaimana permasalahan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam hal obyek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga?

¹ Sri Purwaningsih. *Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Studi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Tesis Universitas Diponegoro 2010)*, <http://eprints.undip.ac.id/24506/pdf>, hal 18 diakses tanggal 29 agustus 2019

² Willer Napitupulu, *kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Yang dikuasai Pihak Ketiga*, <http://jurnal.unissula.ac.id>, jurnal hukum khaira ummah, volume 12 nomor 2, juni 2017, hal 3 diakses tanggal 8 januari 2020

Penyelesaian Permasalahan Hukum Jaminan Fidusia (litigasi dan non litigasi)

Penyelesaian sengketa dalam permasalahan hukum diperlukan dengan upaya yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat untuk menuju ke arah perdamaian. adapun metode penyelesaian sengketa hukum yang berlaku secara umum dibagi menjadi dua bentuk antara lain :

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)

Litigasi merupakan penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. lembaga penyelesaian sengketa litigasi terbagi menjadi dua yaitu pengadilan umum yang merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk mencari keadilan pada umumnya (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Khusus). dan Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan, hak kekayaan intelektual, dan lembaga penjamin simpanan.³

2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan sebuah alternatif yang didasari pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. dan sebagai akibatnya, penyelesaian sejenis ini tidak mendapat kepastian hukum karena bersifat sukarela. jenis penyelesaian sengketa non litigasi antara lain :

a. Konsultasi

ialah sebuah dialog yang didalamnya terdapat aktifitas bertukar informasi dalam hal untuk memastikan pihak konsultan agar mengetahui lebih dalam tentang suatu tema yang menjadi pokok permasalahan.

a. Negosiasi

ialah sebuah interaksi sosial untuk mendapatkan kesepakatan bersama melalui diskusi internal ketika para pihak saling mengutarakan keinginannya.

³ Tami rusli, *penyelesaian sengketa dalam pembiayaan konsumen melalui jasa pihak ketiga* <http://jurnal.ubl.ac.id>, Pranata Hukum volume 4 Nomor 1, Januari 2009, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hal 5-6 diakses tanggal 14 oktober 2019

b. Mediasi

ialah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan cara meminta bantuan pada pihak ketiga selaku mediator dengan peran membantu para pihak untuk memahami pandangan pihak lain terkait masalah yang disengketakan.

c. Konsiliasi

ialah proses yang dilakukan oleh pihak ketiga (pihak netral) untuk mempertemukan seseorang bersengketa yang memiliki hak dan kewenangan menyampaikan pendapat.

d. Penilaian ahli

ialah suatu upaya mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan mengundang beberapa orang ahli untuk memberi penilaian terkait pokok sengketa agar mencapai jalan keluar terbaik.⁴

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa perkataan tertulis ataupun lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. dari jenis kualitatif mengarah kepada suatu metode yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek dan obyek penelitian yang kemudian dianalisis dan dikomparasikan berdasarkan fakta yang sedang terjadi saat ini dengan mencoba untuk memberikan suatu pemecahan masalah.⁵

Penelitian akan diarahkan untuk mendapat fakta di lapangan yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, permasalahan hukum yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi terkait pengalihan obyek jaminan fidusia. serta penerapan metode pendekatan yuridi sempiris digunakan untuk menganalisa berlakunya pasal 23 Undang Undang Nomor 42 Tahun

⁴ Bhatara Surya. *Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Obyek Jaminan Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan (studi bank perkreditan rakyat)*.
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal 15-19 diakses tanggal 14 oktober 2019

⁵ Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta. UII Press, hal 28

1999 tentang jaminan fidusia terkait larangan dan sanksi dalam pengalihan obyek jaminan fidusia di FIFGROUP cabang Malang 2singosari.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terpisah menjadi dua yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder :

1. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia yaitu Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
2. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memberikan uraian mengenai peraturan perundang undangan yang bersumber dari studi kepustakaan, literatur, jurnal hukum online, ataupun kamus hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut amiruddin dan zainal asikin, teknik pengumpulan data dibagi menjadi tiga yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Metode ini akan dilakukan dengan cara mewawancarai *manager* FIFGROUP cabang malang 2 singosari serta karyawan FIFGROUP yang mempunyai tugas terhadap kasus yang diteliti oleh penulis.

2. Observasi

observasi dilakukan di kantor FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari untuk mengetahui proses pengajuan kredit debitur, eksekusi obyek jaminan fidusia, serta negosiasi terkait timbulnya permasalahan hukum.

3. Dokumentasi

Metode yang diperoleh dengan cara melihat dan menganalisa dokumen yang dibuat oleh tempat penelitian (FIFGROUP). dokumen tersebut dalam bentuk surat, catatan harian, foto, dan sebagainya yang berkaitan dengan obyek penelitian.⁶

⁶ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali pers, hal 67

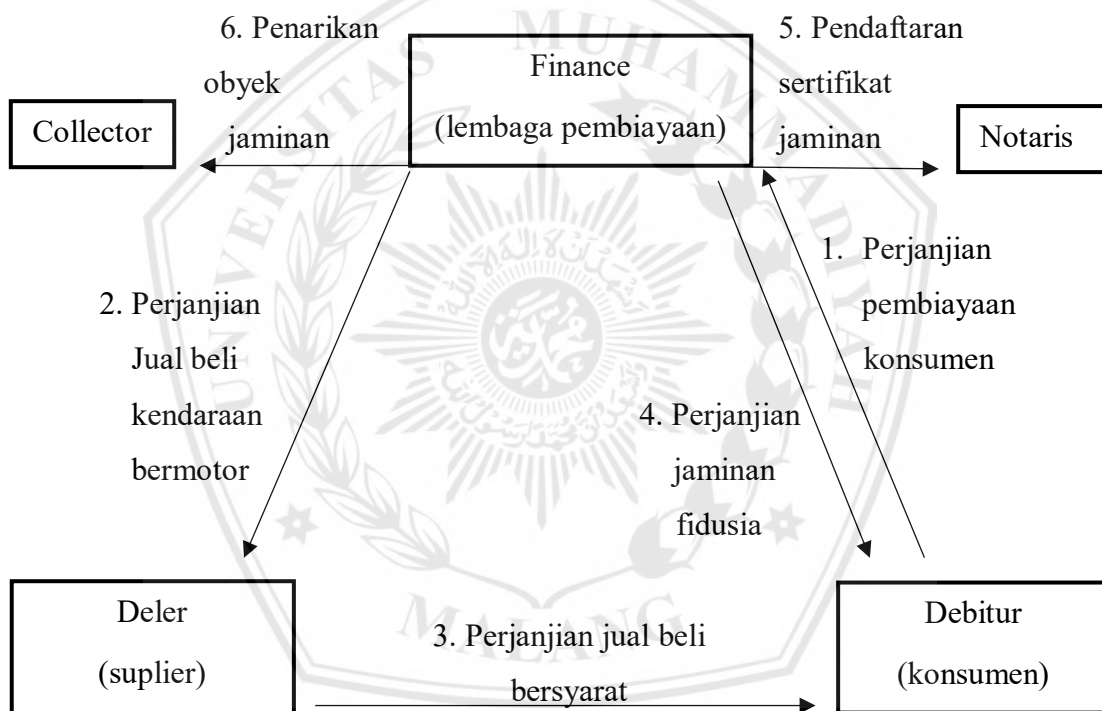
Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan Hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen FIFGROUP

Dalam hubungan hukum jaminan fidusia sudah dituangkan ke dalam berbagai aturan hukum berupa Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta pelaksanaannya sudah diatur berdasarkan perjanjian pembiayaan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta adanya *suplier* (deler) selaku pihak penyedia kendaraan bermotor.

Bagan 1

Hubungan Hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen



Sumber data : Analisa penulis diolah tanggal 10 Desember 2019

Perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor antara FIFGROUP dengan debitur dilakukan melalui 6 tahap yaitu :

1. Perjanjian pembiayaan konsumen (Debitur dengan FIFGROUP)

Dalam perjanjian ini, para pihak yaitu FIFGROUP selaku kreditur dan konsumen selaku debitur mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembelian barang yang dilakukan secara mengangsur serta didalamnya memuat jenis obyek pembiayaan, biaya terkait pemberian pembiayaan,

struktur pembiayaan, serta pemberitahuan terkait denda dan biaya lain. dari perjanjian tersebut akan ditanda tangani oleh debitur dan *credit head* malang selaku perwakilan kreditur.

Bisnis pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh FIFGROUP selaku perusahaan pembiayaan sudah memenuhi fungsinya, sesuai dengan norma yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

- a. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
- b. Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - 1) Pembiayaan kendaraan bermotor.
 - 2) Pembiayaan alat-alat rumah tangga.
 - 3) Pembiayaan barang-barang elektronik.
 - 4) Pembiayaan perumahan.

Apabila ditinjau dari segi perjanjian pembiayaan konsumen antara FIFGROUP dengan debitur, sudah memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHPerdata). dan perjanjian pembiayaan tersebut telah dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPerdata) bahwa setiap orang berhak untuk membuat perjanjian dengan siapapun selagi tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum, dan Undang Undang yang berlaku.

2. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor (FIFGROUP dengan Deler)

Dibentuklah suatu perjanjian kerjasama antara FIFGROUP dengan deler untuk mencapai profit perusahaan. pihak deler akan mengirim kendaraan bermotor sesuai dengan pesanan debitur jika sudah dikeluarkannya PO dengan menyertakan dokumen inti dari debitur (ktp dan kk asli). terkadang, pihak deler sering tidak menyertakan dokumen inti dengan alasan dokumen tersebut hilang atau dalam masa kepengurusan dan mendesak FIFGROUP untuk tetap melakukan pembayaran atas pembelian kendaraan bermotor tersebut. padahal, hal tersebut tentu menyalahi kesepakatan dalam surat perjanjian.

Di sisi lain, perjanjian jual beli merupakan suatu jenis perjanjian timbal balik. dari perjanjian timbal balik itu muncul suatu hak dan kewajiban masing masing

pihak. hak pembeli untuk memperoleh barang dan hak penjual untuk mendapatkan pembayaran barang dan begitu pula sebaliknya. pihak FIFGROUP akan membayar nominal harga kendaraan ke deler dari setiap pengajuan kredit yang disetujuinya sebagai pertanda adanya transaksi jual beli yang sah. sesuai dengan pasal 1458 KUHPerdara "jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar".

3. Perjanjian jual beli bersyarat (Deler dengan Debitur)

Deler merupakan pihak yang menjembatani antara debitur dan kreditur, arti dari menjembatani adalah terjadinya proses jual beli bersyarat. deler sebagai penjual kendaraan bermotor mensyaratkan bahwa pembayaran atas harga barang akan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu finance (kreditur). apabila, pihak kreditur membatalkan pencairan dana kepada pihak deler maka pihak deler juga akan membatalkan transaksi jual beli kendaraan bermotor dengan debitur (konsumen).

Perjanjian semacam ini dapat dikategorikan sebagai perikatan bersyarat yang sudah diatur dalam pasal 1253 KUHPerdara "suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut". syarat adalah suatu bagian yang khusus dari perjanjian itu sendiri dan dapat menimbulkan akibat hukum dari suatu perjanjian tersebut. dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pihak ketiga selaku perusahaan pembiayaan (FIFGROUP) menjadi syarat mutlak demi berlangsungnya transaksi jual beli antara deler dengan debitur.

4. Perjanjian jaminan fidusia (FIFGROUP dengan debitur)

Perjanjian jaminan fidusia antara FIFGROUP dengan debitur dituangkan dalam bentuk surat kuasa pembebanan jaminan fidusia. dari surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tercantum debitur sebagai pemberi kuasa dan FIFGROUP adalah sebagai penerima kuasa. debitur selaku pemberi jaminan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada FIFGROUP selaku penerima jaminan. fungsi dari surat kuasa ini adalah untuk mewakilkan pemberi kuasa (debitur) melakukan tindakan hukum

dalam hal membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia serta mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia hingga diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia.

Faktanya, dalam proses pembuatan dan penandatanganan akta jaminan fidusia para pihak tidak hadir secara langsung di hadapan notaris. dalam Undang Undang Jaminan Fidusia memang tidak diatur secara eksplisit terkait kehadiran para pihak dalam pembuatan akta jaminan fidusia. namun, syarat pembuatan suatu akta adalah dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat yang berwenang (notaris) mengenai suatu perjanjian.

Pasal 1868 KUHPerdara "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".

Sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris. apabila, akta jaminan fidusia tidak dibuat dan ditanda tangani di hadapan notaris maka akta tersebut bisa dikategorikan sebagai akta dibawah tangan. dan akta jaminan fidusia tersebut batal demi hukum sehingga obyek jaminan fidusia tidak bisa didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia.

5. Perjanjian kerjasama dalam pembuatan akta dan pendaftaran obyek jaminan fidusia (FIFGROUP dengan Notaris)

Hubungan hukum antara Notaris dengan FIFGROUP hanya sebatas pelaksanaan pendaftaran obyek jaminan fidusia dan pembuatan akta jaminan fidusia sesuai dengan substansi surat penunjukan notaris. tugas notaris lainnya yaitu wajib merahasiakan segala bentuk informasi terkait debitur dan obyek jaminan. apabila, notaris cidera janji pihak FIFGROUP berhak untuk mengakhiri hubungan hukum secara sepihak sesuai dalam pasal 3 surat penunjukan notaris dari FIFGROUP.

Peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia diatur oleh pasal 15 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse,

salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Dalam prakteknya, FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari secara keseluruhan sudah membuat akta dibawah tangan berupa surat perjanjian pembiayaan dan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta jaminan fidusia. dalam akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris Liana Maria Fatkhaturun, secara keseluruhan sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu :

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
 - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - c. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
 - d. Nilai penjaminan
 - e. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
6. Pemberian kuasa untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia (FIFGROUP dengan *collector*)

FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari mempunyai dua (2) jenis penagihan sebagai berikut :

- a. *collector internal* merupakan karyawan FIFGROUP yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan angsuran yang menunggak dari debitur dengan keterlambatan minimal 4 hari.
- b. *collector eksternal* merupakan pihak penagihan yang berasal dari biro jasa dan diberi kuasa oleh FIFGROUP untuk melakukan eksekusi obyek jaminan dari debitur cidera janji (keterlambatan 2 bulan ke atas).

Surat kuasa yang diberikan FIFGROUP kepada *collector eksternal* berisi tentang kewenangan eksekusi obyek jaminan yang sudah diatur dalam pasal 30 Undang Undang Nomer 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang menjelaskan ”pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia” disamping itu, *collector eksternal* akan melakukan tugasnya disaat debitur dalam keadaan lengah seperti penarikan obyek dijalan.

Seorang *collector eksternal* dapat menyalahi prosedur penarikan obyek jaminan. apabila, proses pengeksekusian dilakukan dengan cara memaksa dan merampas. karena perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu pasal 368 KUHP yang berbunyi ”barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapus hutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”

Berdasarkan penelitian di kantor FIFGROUP malang 2 (singosari), bahwa hubungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan memuat hak dan kewajiban antara lain :

1. Hak dan kewajiban FIFGROUP (perusahaan pembiayaan)

a. Hak

- 1) Hak menerima sejumlah pembayaran hutang dari debitur yang telah disepakati sesuai dengan jangka waktu tertentu.
- 2) Setiap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia FIFGROUP berhak untuk menyita surat kepemilikan kendaraan sebagai jaminan pelunasan hutang dari debitur.
- 3) Hak jaminan kebendaan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur terhadap kreditur lain.
- 4) Kreditur mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia.

b. Kewajiban

- 1) Penjelasan informasi pokok kepada debitur terkait pola pembayaran angsuran, struktur kredit, serta denda yang harus dibayar dalam hal adanya keterlambatan pembayaran angsuran.
- 2) Melakukan pencairan pembayaran kendaraan bermotor kepada dealer terkait disetujuinya pengajuan kredit yang dilakukan debitur.
- 3) FIFGROUP sebagai kreditur penyedia dana berkewajiban menyerahkan dokumen kendaraan berupa BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) apabila kredit yang dilakukan debitur sudah lunas.

- 4) Melakukan konfirmasi kepada debitur mengenai pengajuan kredit yang dilakukannya apakah *approval* (disetujui) atau *reject* (ditolak).⁷

Yang sering terjadi dari tidak terpenuhinya hak FIFGROUP adalah hak dalam hal menerima pembayaran angsuran tepat waktu. serta, mayoritas kredit macet terjadi dalam masa angsuran 1 tahun hingga 2 tahun. kewajiban FIFGROUP untuk melakukan konfirmasi pengajuan kredit kepada debitur tidak dilakukan sepenuhnya. dalam hal disetujui atau tidak pengajuan kredit debitur dikonfirmasi oleh pihak dealer sebagai *supplier* kendaraan bermotor. tidak adanya konfirmasi dari hasil pengajuan kredit tersebut, biasanya diterapkan pada debitur yang di *reject* (tolak). selain itu, penyampaian penjelasan informasi pokok dari pihak *survey* lapangan kepada debitur kurang detail dan jelas. menyebabkan debitur buta akan informasi terhadap tata cara pembayaran dan konsekuensi keterlambatan pembayaran angsuran.

2. Hak dan kewajiban debitur

a. Hak

- 1) Konsumen berhak untuk diperlakukan dan dilayani secara baik benar dan jujur.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria menurut debitur.
- 3) Hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi ataupun penggantian terhadap barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Debitur berhak menerima STNK motor sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan oleh dealer (minimal 2 minggu dari pengiriman barang).

b. Kewajiban

- 1) Debitur berkewajiban untuk membayar angsuran secara tertib sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati.
- 2) Debitur berkewajiban untuk merawat dengan baik kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila masa kreditnya belum lunas.
- 3) Jika debitur cidera janji maka debitur wajib melunasi seluruh hutangnya kepada FIFGROUP dan membayar biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengeksekusi jaminan.

⁷ Wawancara dengan Bapak Adhi Dwi Candra selaku BM (Branch Manager) FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari, tanggal 26 Oktober 2019

- 4) Debitur berkewajiban menyerahkan data identitas diri yang valid tanpa ada rekayasa serta dalam pengisian form pengajuan kredit oleh debitur haruslah bersifat kooperatif sesuai fakta dan kondisi.⁸

Salah satu kewajiban debitur yang sulit untuk dilakukan adalah cidera janji yang mengakibatkan debitur harus melunasi seluruh hutangnya. hutang yang dimaksud adalah hutang pokok beserta denda dan bunga. saat debitur melakukan cidera janji yang menyebabkan pengeksekusian obyek jaminan dan debitur tidak sanggup melunasi hutangnya, pihak FIFGROUP berdasarkan kesepakatan bersama melakukan penjualan obyek dibawah tangan. sesuai dengan pasal 15 ayat 3 yang berbunyi "apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri".

3. Hak dan kewajiban deler (suplier)

a. Hak

- 1) Ada begitu banyak perusahaan pembiayaan di malang dan deler berhak untuk memilih perusahaan pembiayaan yang tepat untuk pengajuan kredit yang dilakukan debitur.
- 2) Deler berhak mendapat pelayanan yang lebih (bonus) terkait dengan meningkatnya penjualan kendaraan yang diarahkan ke FIFGROUP.
- 3) Deler berhak mendapat uang muka kendaraan bermotor dari debitur sesuai dengan kesepakatan.

b. Kewajiban

- 1) Deler berkewajiban mengurus segala jenis surat kendaraan bermotor (STNK, dan BPKB) debitur sehari setelah pengiriman unit ke samsat terdekat.
- 2) STNK motor wajib diserahkan ke debitur dan BPKB motor wajib diserahkan ke FIFGROUP (minimal 3 bulan setelah pengiriman unit).
- 3) Adanya program perawatan *service* gratis berkala terhadap kendaraan bermotor yang dijamin selama 1 tahun.⁹

⁸ Wawancara dengan Bapak Adhi Dwi Candra selaku BM (Branch Manager) FIFGROUP Malang 2 cabang Singosari, tanggal 26 Oktober 2019

⁹ Wawancara dengan Bapak Dani Nur Saputro selaku PIC (kepala) Deler Sekawan Motor Singosari, tanggal 27 Oktober 2019

Uang muka merupakan uang tanda jadi bahwa debitur bersedia membeli kendaraan bermotor di deler tersebut. adanya keterlambatan pembayaran uang muka menjadi alasan hak deler belum sepenuhnya terpenuhi. sebagian debitur akan membayar uang muka disaat STNK motor berserta plat motor sudah tercetak. implementasi terkait kewajiban deler kepada seluruh mitra kerja sudah terlaksana baik dengan mengedepankan kualitas produk yang dijual dan berpedoman pada pelayanan yang memuaskan bagi debitur (konsumen).

4. Hak dan kewajiban Notaris

a. Hak

- 1) Mendapat jasa pembayaran atas pembuatan akta notaris terkait perjanjian pembiayaan konsumen dari kreditur.
- 2) Notaris berhak untuk memperoleh informasi yang sebenar benarnya terkait obyek jaminan fidusia yang akan didaftarkan.

b. Kewajiban

- 1) Merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta dan surat surat yang berhubungan dengan jaminan fidusia untuk melindungi para pihak yang berkepentingan.
- 2) Bersedia menjadi saksi hukum apabila terjadi suatu permasalahan hukum terkait jaminan fidusia.

Pada dasarnya, notaris telah melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya terkait pembuatan akta jaminan fidusia serta pendaftaran obyek jaminan fidusia di FIFGROUP. hal itu sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 5 ayat 1 "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia".

Pasal 11 ayat 1 "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan".¹⁰

5. Hak dan kewajiban *collector* (penagihan)

- a. Hak yang diperoleh collector (penagihan) adalah menerima sejumlah gaji dari perusahaan pembiayaan terkait jasa penarikan obyek jaminan fidusia.

¹⁰ Pasal 5 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1 Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

- b. Kewajiban yang diperoleh collector (penagihan) adalah melakukan kunjungan penagihan ke rumah debitur serta mengeksekusi obyek jaminan fidusia ditangan debitur dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan secara utuh.

Dalam surat kuasa eksekusi obyek jaminan fidusia, FIFGROUP selaku pemberi kuasa memberikan tugas kepada pihak *collector eksternal* selaku penerima kuasa untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia. mengenai surat kuasa itu, baik *collector internal* maupun *eksternal* berkewajiban untuk menjalankan perintah sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di Indonesia. jika terjadi pelanggaran terhadap norma, maka pihak *collector* bertanggung jawab secara pribadi terhadap tuntutan yang timbul dikemudian hari. dan rata rata setiap harinya ada 50 unit kendaraan bermotor yang dapat dieksekusi oleh *collector eksternal* dengan uang jasa sebesar Rp.1.500.000,- per unit. dari uang jasa tersebut, diberikan kepada ketua tim dan per tim mempunyai 3 sampai 4 orang eksekutor.

Permasalahan Hukum yang sering terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di FIFGROUP

1. Kredit macet

Kredit macet dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain kondisi ekonomi debitur, pengajuan yang disalah gunakan, usaha debitur yang mengalami kebangkrutan. namun, dalam perjanjian pembiayaan tidak dijelaskan secara rinci terhadap kreditur yang dapat dikategorikan kredit macet (apakah keterlambatan bulanan atau mingguan). dan hanya sebatas penjelasan mengenai kewajiban debitur untuk membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dihitung perhari sesuai dalam poin 3 ayat 2 tentang bunga denda pajak dan biaya. dalam data yang diambil di FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari angka kredit macet tertinggi berada di bulan juli 2019 yang dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan debitur selepas hari raya idul fitri seperti kebutuhan sekolah anak dan mudik lebaran.

Kredit macet akan menimbulkan kerugian secara finansial bagi kreditur, karena dia akan menyewa *collector eksternal* untuk melakukan penarikan obyek jaminan

fidusia. selain itu, keuntungan yang diperoleh berupa suku bunga kredit mengalami penurunan jika banyaknya kasus kredit macet yang terjadi. seluruh kerugian yang diderita oleh kreditur akan dilimpahkan ke debitur sebagai penanggung jawab atas cidera janji yang dilakukan. hal ini sesuai dengan pasal 1243 KUHPdata bahwa ”penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

2. Obyek jaminan fidusia dalam keadaan tidak sehat atau tidak terawat.

Obyek jaminan yang sudah dieksekusi, biasanya sudah dalam kondisi tidak sehat dan tak terawat. sebagai contoh mesin kendaraan yang awal mulanya bersuku cadang resmi diganti dengan suku cadang bekas atau palsu sehingga rusak dan tak layak pakai. padahal, debitur diwajibkan memakai obyek sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. serta, berkewajiban untuk merawat obyek jaminan sampai masa kredit kendaraan bermotor telah lunas. angka tertinggi obyek jaminan fidusia tidak terawat yang diperoleh dari angka eksekusi obyek jaminan fidusia berada di bulan september 2019. angka tertinggi ini tidak bisa di prediksi berada di bulan apa tiap tahunnya karena obyek yang tidak terawat merupakan niat yang terselubung dari debitur yang menyimpang dari perjanjian.

Dalam peraturan perundang undangan tidak ada satupun yang mengatur tentang kewajiban debitur untuk merawat obyek jaminan fidusia. akan tetapi, peraturan ini sudah diatur dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen poin 4 ayat 2 tentang hak dan kewajiban debitur. salah satu contoh lain debitur berinisial A berlatam di desa Sidoluhur (Lawang) yang pada saat pengeksekusian kondisi kendaraan bermotor dalam keadaan rusak. dimana, ada beberapa bagian kendaraan mengalami kerusakan karena obyek jaminan dipakai oleh debitur untuk mencari rumput di hutan.

3. Mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur.

Tindakan sejenis ini dilakukan debitur dengan berbagai alasan seperti merosotnya perekonomian debitur yang membuatnya banyak terlilit hutang dan pada akhirnya melepas obyek tersebut ke tangan orang lain. pengalihan obyek jaminan fidusia hanya dapat dideteksi disaat adanya kunjungan penagihan ke debitur. mayoritas obyek yang sudah dialihkan akan mempunyai riwayat pembayaran angsuran yang buruk dan akan berujung pada eksekusi obyek jaminan. data yang diperoleh di FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari, angka tertinggi pengalihan obyek jaminan fidusia berada di bulan november dan desember 2019. angka ini dapat berubah tiap tahun tergantung dari adanya niat yang terselubung dan naik turunnya perekonomian debitur. pengalihan obyek jaminan dapat terjadi jika debitur mengalami keterpurukan ekonomi dan sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran kendaraan bermotor hingga lunas.

Dalam perjanjian permbiayaan sudah diatur mengenai hak kewajiban debitur dalam poin 4 ayat 3 yaitu "debitur dilarang mengalihkan barang dengan cara apapun kepada pihak lain kecuali atas persetujuan tertulis dari kreditur." hal tersebut, sekaligus bertentangan dengan pasal 23 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. contoh kasus yang dialami debitur dengan inisial N alamat desa Ketindan (Lawang) yang mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada temannya dengan alasan tak sanggup membayar angsuran kendaraan bermotor setelah menerima PHK dari tempat dia bekerja.

Tabel 1

Pengalihan obyek jaminan fidusia

No.	Bulan	Kredit macet	Obyek tidak terwat	Obyek dialihkan
1.	Juli	51	10	5
2.	Agustus	42	8	4
3.	September	41	12	6
4.	Oktober	40	7	4
5.	November	43	8	7
6.	Desember	49	9	7

Sumber data : Divisi penagihan FIFGROUP diolah tanggal 15 januari 2020

Penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam hal obyek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan konsumen

Pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan FIFGROUP dan menimbulkan kredit macet yang berkepanjangan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi (cidera janji). Untuk memberi efek jera, FIFGROUP akan melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia. Namun, ada persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum mengeksekusi obyek jaminan fidusia yaitu pendaftaran obyek jaminan fidusia. FIFGROUP Malang 2 Singosari telah melakukan pendaftaran obyek jaminan fidusia kepada seluruh perjanjian kredit sepeda motor baru dengan proses pendaftaran obyek jaminan fidusia bekerja sama dengan Notaris Ibu Liana Maria Fatikhatun.

Perjanjian kredit yang mengikat antara FIFGROUP dengan debitur sudah didaftarkan seluruhnya ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini sudah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan kewajiban untuk didaftarkannya suatu obyek jaminan fidusia. Dengan adanya kesadaran hukum tinggi membuat betapa pentingnya sertifikat jaminan fidusia sebagai syarat pengeksekusian obyek jaminan. Pendaftaran di era sekarang lebih praktis dan mudah dengan dilakukan secara online sedangkan dulu notaris melalui staf harus secara langsung datang ke kantor pendaftaran fidusia. Mayoritas perjanjian kredit yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah sejenis koperasi ataupun pinjaman perorangan.¹¹

Tabel 2

Biaya pembuatan sertifikat jaminan fidusia

No.	Nilai penjaminan	Besar biaya
1.	< Rp 50.000.000,00	Rp 50.000,00
2.	> Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	Rp 100.000,00
3.	> Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	Rp 200.000,00
4.	> Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	Rp 500.000,00
5.	> Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000,00
6.	> Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00	Rp 2.000.000,00

¹¹ Wawancara dengan Notaris Liana Maria Fatikhatun alamat Jl. Sidomakmur No. 72 Sengkaling, Mulyoagung-Dau, Malang, tanggal 28 Oktober 2019

7.	> Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00	Rp 3.000.000,00
8.	> Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00	Rp 5.000.000,00
9.	> Rp 10.000.000.000,00	Rp 7.500.000,00

Sumber data : Notaris Ibu Liana Maria Fatikhatun diolah tanggal 4 Desember 2019

Debitur merupakan pemegang obyek jaminan fidusia dan kreditur adalah pemegang surat kepemilikan obyek jaminan fidusia. surat kepemilikan obyek jaminan fidusia mempunyai nilai jual yang lebih murah daripada obyek jaminan fidusia. kondisi seperti ini yang mempengaruhi debitur mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dari pada harus mentaati substansi dalam prestasi. dengan berpegang teguh pada sertifikat jaminan fidusia, segala upaya untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia baik berada ditangan debitur ataupun pihak ketiga akan mendapat perlindungan hukum yang jelas dari Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. dengan kata lain, kreditur (FIFGROUP) mempunyai hak *preferent* atau kepentingannya wajib didahulukan dari pada kreditur lain jika sudah berkekuatan hukum tetap.

Dari awal perjanjian kredit sepeda motor sudah dijelaskan pada saat kunjungan surveyor terkait dengan verifikasi data lapangan, debitur dilarang mengalihkan baik dijual maupun digadaikan benda jaminan fidusia tanpa sepengetahuan FIFGROUP sebelum masa kredit benda jaminan tersebut belum lunas. apabila, di tengah perjalanan debitur mengalami kredit macet dengan ringan hati pihak FIFGROUP akan melakukan penarikan obyek jaminan fidusia untuk mengembalikan kerugian yang diderita perusahaan dengan cara melakukan pelelangan ataupun penjualan obyek berdasarkan kesepakatan bersama.¹²

Berikut merupakan proses penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari :

1. Penyelesaian permasalahan hukum untuk menekan angka kredit macet di FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari
 - a. Adanya pemberitahuan tanggal jatuh tempo konsumen via telpon

Karyawan FIFGROUP yang mempunyai tugas sebagai pihak pengingat tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran debitur adalah *descall*. setidaknya 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo debitur sudah diingatkan oleh *descall*

¹² Wawancara dengan Bapak Adhi Candra Nurahma BM (Branch Manager) PT. FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari, 25 Oktober 2019

FIFGROUP. pada proses awal perjanjian jaminan fidusia, pihak *surveyor* diwajibkan meminta minimal 3 nomor *handphone* debitur baik itu dari saudara tetangga ataupun teman dekat. hal ini difungsikan agar pada saat nomor hp pertama gagal dihubungi maka *descall* masih mempunyai beberapa nomor cadangan debitur yang tertera di kontrak perjanjian. setiap harinya 1x24 jam *descall* berkewajiban menagih debitur yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran via telpon sampai debitur telah melakukan pembayaran angsuran secara valid ke rekening FIFGROUP.

b. Adanya kunjungan *Collector internal* FIFGROUP

Jika berselang 3 hari dari tanggal jatuh tempo tidak ada respon pembayaran angsuran dari debitur, tugas berikutnya adalah kunjungan *collector internal* FIFGROUP ke kediaman debitur. dengan melakukan kunjungan secara langsung akan mengetahui alasan debitur mengalami penunggakan angsuran dan mengetahui apakah obyek masih ditangan debitur atau sudah dialihkan ke pihak lain. *collector internal* dituntut untuk mengunjungi tempat tinggal debitur setidaknya sekali dalam sehari. setiap harinya mereka harus membuat laporan harian terhadap hasil kunjungan serta janji bayar para debitur. *collector internal* mempunyai sistem kerja yang bersifat target bulanan sehingga mereka di proyeksikan oleh *management* untuk menyelesaikan seluruh bahan tagih yang ada di bulan tersebut.

c. Memberikan surat peringatan (somasi) kepada debitur

Surat peringatan (Somasi) diberikan kepada debitur dengan keterlambatan pembayaran angsuran melebihi 1 bulan dari tanggal jatuh tempo. ada beberapa langkah dalam melakukan somasi sebelum dilakukan eksekusi jaminan fidusia antara lain :

- 1) Somasi pertama (dilakukan tepat 1 bulan keterlambatan debitur dari tanggal jatuh tempo)
- 2) Somasi kedua (dilakukan tepat 1 bulan lebih 1 minggu dari tanggal jatuh tempo)

3) Somasi ketiga (dilakukan tepat 1 bulan lebih 2 minggu dari tanggal jatuh tempo)¹³

Surat somasi menjelaskan bahwa adanya tunggakan angsuran yang belum terbayarkan dan mewajibkan debitur untuk segera melunasi tunggakan tersebut dengan mengedukasi resiko yang akan timbul seperti cacatnya nama debitur di dunia perbankan serta mempersulit langkah debitur dalam melakukan pengajuan kredit dikemudian hari.

d. eksekusi obyek jaminan fidusia

FIFGROUP akan berkoordinasi dengan *collector eksternal* yang bertugas untuk mencari dan menyelidiki keberadaan obyek jaminan fidusia meskipun berada ditangan pihak ketiga. sumber informasi mengenai keberadaan unit adalah dari debitur, tetangga sekitar, kerabat, atau rekan kerja debitur. pada prinsipnya *collector eksternal* lebih mengedepankan pendekatan secara musyawarah mufakat terkait dengan penarikan obyek jaminan fidusia terhadap debitur cidera janji. jika jalan musyawarah tidak memberikan hasil terbaik, dengan sangat terpaksa *collector eksternal* akan mengeksekusi obyek jaminan disaat obyek melintasi jalan protokol. proses selanjutnya, debitur akan didampingi ke kantor FIFGROUP terdekat untuk melihat tunggakan administrasi pembayaran angsuran secara nyata.¹⁴

Obyek jaminan fidusia yang sudah di eksekusi, akan mewajibkan debitur untuk membayar biaya penarikan unit, denda, serta angsuran pokok yang tertunggak. jika debitur tidak bisa memenuhi prestasi, jalan terakhir yang ditempuh adalah penjualan obyek jaminan fidusia secara dibawah tangan sepanjang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. kondisi seperti ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia yang berbunyi "apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan dapat dilakukan dengan cara :

¹³ Wawancara dengan Bapak Budaya Alam selaku SPV collector FIFGROUP Malang 2 cabang Singosari, tanggal 20 November 2019

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Adhi Dwi Candra selaku BM (Branch Manager) FIFGROUP Malang 2 cabang Singosari, tanggal 20 November 2019

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia.
 - 2) Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - 3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh dengan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”
2. Penyelesaian permasalahan hukum obyek jaminan dalam keadaan tidak terawat

Obyek jaminan yang tidak terawat hanya dapat diketahui pada saat sudah dieksekusi dengan posisi debitur mengalami cidera janji. dari pengeksekusian dan menyebabkan penjualan obyek dibawah tangan mengakibatkan debitur harus memperbaiki kondisi obyek jaminan secara utuh agar tidak mengalami penurunan harga jual yang signifikan dari harga pasar. selain itu, tugas perbaikan akan dibebankan ke FIFGROUP apabila debitur tidak berkenan untuk itu. dengan syarat, harga jual obyek jaminan fidusia akan dikurangi biaya perbaikan. begitu pula sebaliknya, proses perbaikan obyek jaminan fidusia tidak akan dilakukan oleh FIFGROUP jika debitur mengambil alih obyek jaminan yang sudah di eksekusi dengan memenuhi kewajibannya yaitu membayar seluruh tunggakan angsuran.

3. Penyelesaian permasalahan hukum terkait pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur

Sebelumnya, proses pengalihan obyek jaminan fidusia ke pihak ketiga dibedakan menjadi 3 jenis antara lain :

- a. Pengalihan dalam bentuk dipindah tangankan

Maksud dari dipindah tangankan adalah debitur dengan pengguna unit adalah orang yang berbeda sebagai contoh debitur bernama si A yang sudah menyetujui klausul dalam perjanjian pembiayaan konsumen. setelah, pengajuan kreditnya di setujui oleh kreditur ternyata pengguna unit adalah si B yang tak lain adalah teman kerja debitur. mayoritas debitur yang memindah tangankan obyek jaminan fidusia akan mempunyai *track record* (riwayat angsuran) yang buruk dikarenakan susah untuk mengontrol pola bayar apabila pengguna unit orang lain.

Pihak FIFGROUP tidak akan merubah nama debitur menjadi nama pengguna unit karena perubahan nama akan berdampak pada perubahan seluruh kontrak perjanjian. hal yang dapat dilakukan FIFGROUP mengenai permasalahan itu adalah disaat terjadi keterlambatan pembayaran angsuran *collector internal* segera melakukan kunjungan penagihan ke alamat pengguna unit bukan ke alamat debitur.

b. Pengalihan dalam bentuk gadai

Obyek jaminan fidusia digadaikan oleh debitur ke perorangan bukan suatu lembaga yang sudah berbadan hukum. faktor kebutuhan ekonomi yang tak terduga membuat debitur meminjam sejumlah uang demi mencukupi kebutuhan hidupnya dengan jaminan kendaraan yang masih dalam masa kredit. konsekuensinya, angsuran kendaraan tersebut mengalami keterlambatan pembayaran karena selain menanggung pembayaran angsuran di kreditur, debitur juga menanggung pembayaran hutang untuk menebus obyek jaminan yang digadaikan.

Proses penyelesaian permasalahan hukum diatas adalah apabila obyek jaminan fidusia digadaikan debitur ke pihak ketiga dengan nominal dibawah 3 juta. maka, FIFGROUP bisa melakukan tebus gadai ke pihak ketiga. namun, FIFGROUP tidak akan mengembalikan obyek tersebut ke tangan debitur lagi dan akan melakukan penjualan dibawah tangan sebagai cara untuk melunasi hutang debitur. FIFGROUP hanya akan melakukan tebus gadai dengan nilai transaksi dibawah 3 juta, apabila melebihi itu maka tugas debitur untuk menambah sisanya.

c. Pengalihan dalam bentuk dijual

Obyek jaminan fidusia yang telah dijual kepada pihak ketiga merupakan suatu bentuk cidera janji terparah. kasus yang terjadi dalam lingkungan FIFGROUP sebagai contoh seseorang dengan itikad buruk menjual obyek jaminan fidusia dalam keadaan masa kredit belum lunas ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. obyek yang dijual hanyalah 1 unit sepeda motor beserta STNK nya, biasanya obyek jaminan fidusia tersebut dijual dengan sangat murah kisaran 30 % dari harga pasar. mayoritas para pembeli adalah

orang pelosok daerah atau daerah pinggiran perkotaan yang masyarakatnya minim pengetahuan tentang hukum.

Pada dasarnya, proses penyelesaian permasalahan hukum terkait obyek jaminan fidusia yang dialihkan sama dengan proses penyelesaian permasalahan hukum terkait kredit macet yaitu eksekusi obyek jaminan fidusia yang mengarah pada penjualan dibawah tangan. jika obyek dijual, pihak pembeli akan mendapat hasil dari penjualan tersebut sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan dengan debitur. serta debitur terancam tidak akan bisa melakukan pengajuan kredit di FIFGROUP karena namanya sudah di *blacklist* oleh sistem. hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat 3 "apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri".

Perbuatan debitur dalam permasalahan tersebut sudah bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku serta dapat dikenakan sanksi pidana. semua itu sudah tercantum dalam pasal 23 ayat 2 dan pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- 1) Pasal 23 ayat 2 "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia."
- 2) Pasal 36 "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (tahun) dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah."

Unsur unsur yang terdapat dalam pasal tersebut terbagi menjadi 2 yaitu

- a) Unsur obyektif : mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, benda obyek jaminan fidusia, pemberi fidusia (debitur), dan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditur).
- b) Unsur subyektif : melawan hukum, serta dilakukan dengan sengaja.

Meskipun obyek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga mayoritas mengalami kredit macet. masih ada beberapa macam kasus yang serupa tetapi pembayaran angsuran kendaraan bermotor tetap berjalan lancar dan tidak sampai di eksekusi oleh FIFGROUP. intinya, FIFGROUP hanya menginginkan pola bayar yang tertib dan lancar dari debitur. apabila, hal tersebut dipenuhi maka FIFGROUP tidak mempersoalkan obyek jaminan berada ditangan siapa.

Mengacu pada permasalahan hukum yang terjadi di FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari, menimbulkan beberapa metode terkait penyelesaian permasalahan hukumnya yaitu :

1. Litigasi

Metode litigasi merupakan metode penyelesaian permasalahan hukum melalui gugatan ke jalur pengadilan. gugatan ditujukan kepada tergugat sebagai akibat dari tindakannya yang merugikan penggugat untuk mendapat perlindungan hukum yang bersifat adil dan mempunyai kekuatan hukum tetap. maka dari itu, penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi merupakan langkah terakhir yang ditempuh para pihak setelah penyelesaian sengketa yang lain dilakukan. dalam prakteknya, pihak kreditur selaku FIFGROUP tidak pernah menggunakan jalur litigasi sebagai metode penyelesaian permasalahan hukum dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu permasalahan terlalu lama, jalur pendaftaran kasus yang berbelit, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan penelitian, pihak FIFGROUP hanya sebatas pelaporan ke kepolisian terdekat itu pun dengan alasan debitur tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kendaraan bermotor. sebagai contoh obyek jaminan sudah dialihkan debitur kepada pihak ketiga yang menyebabkan debitur pindah rumah atau minggat. mayoritas masyarakat singosari dan lawang (area FIFGROUP malang 2 Singosari) mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi. apabila, debitur mendapat surat panggilan dari pihak kepolisian terkait adanya laporan pelanggaran hukum maka yang bersangkutan ataupun keluarga akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalur musyawarah.

2. Non litigasi

Metode non litigasi merupakan proses penyelesaian perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan. dalam jalur non litigasi, pihak yang bertikai akan

dipertemukan guna membahas tentang permasalahan hukum yang terjadi serta menyimpulkan solusi yang tepat baik adanya pihak penengah (mediator) ataupun tidak. mediator akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan agar tidak terjadi perselisihan dengan prinsip tidak ada pihak yang dirugikan. sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi "sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri".

Tabel 3
Penyelesaian permasalahan hukum (litigasi dan non litigasi)

No	Bulan	Jalur	Penarikan unit	Obyek dialih kan	Obyek ditangan debitur (kredit macet)	Penyelesaian permasalahan hukum
1.	Juli	Litigasi Non litigasi	54 unit	0 5 unit	0 49 unit	0 50 unit (92%)
2.	Agustus	Litigasi Non litigasi	46 unit	0 4 unit	0 42 unit	0 42 unit (91%)
3.	September	Litigasi Non litigasi	47 unit	0 6 unit	0 41 unit	0 43 unit (91%)
4.	Oktober	Litigasi Non litigasi	44 unit	0 4 unit	0 40 unit	0 39 unit (88%)
5.	November	Litigasi Non litigasi	50 unit	0 7 unit	0 43 unit	0 44 unit (86%)
6.	Desember	Litigasi Non litigasi	58 unit	0 7 unit	0 51 unit	0 48 unit (82%)

Sumber data : Divisi Penagihan FIFGROUP diolah tanggal 15 januari 2020

Munculnya permasalahan hukum yang terjadi di FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari adalah akibat dari debitur wanprestasi (cidera janji) dengan mengimplementasikan metode penyelesaian melalui jalur non litigasi (negosiasi dan mediasi) yang dianggap lebih cepat dan tepat. dimana, FIFGROUP melakukan negosiasi melalui diskusi formal dengan debitur melalui *collector internal* dalam hal

penunggakan hutang debitur yang harus dibayar. apabila, metode negosiasi tidak berhasil maka melalui surat kuasa pihak FIFGROUP akan meminta bantuan pihak ketiga (mediator) yaitu *collector eksternal* untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia walaupun berada di tangan pihak ketiga. obyek yang sudah dieksekusi akan menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur yaitu membayar biaya penarikan, membayar angsuran pokok, dan denda yang harus dibayar. jika debitur tidak bisa membayar seluruh hutangnya dilakukanlah penjualan obyek jaminan secara dibawah tangan.

Tabel 4

Uji materi Undang Undang jaminan fidusia melalui putusan
MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi obyek jaminan fidusia

UU No 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019
Pasal 15 ayat 2 Undang Undang Jaminan Fidusia	
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam

	pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
Pasal 15 ayat 3 Undang Undang Jaminan Fidusia	
Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.	Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
Pasal 15 ayat 2 Undang Undang Jaminan Fidusia	
Kekuatan eksekutorial diperoleh apabila debitur sudah memegang sertifikat jaminan fidusia yang berfungsi sebagai syarat eksekusi obyek jaminan yang berkekuatan hukum tetap setara dengan putusan pengadilan.	Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada

	kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
--	--

Sumber data : www.djkn.kemenkeu.go.id, diolah tanggal 21 Maret 2020

Sebelum putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, pihak kreditur akan tetap mengeksekusi obyek jaminan meskipun makna cidera janji tidak disepakati bersama. dan pihak debitur tidak mempunyai ruang untuk melakukan pembelaan apalagi debitur merasa bahwa tidak pernah melakukan cidera janji. pembelaan ini dilakukan atas dasar tidak ada penjelasan secara jelas pada proses awal perjanjian pembiayaan konsumen mengenai resiko yang diterima debitur apabila terjadi kredit macet dikemudian hari. selain itu, paska putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 timbul salah penafsiran di lingkungan masyarakat yaitu pihak kreditur atau perusahaan pembiayaan tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan secara serta merta dan diwajibkan mengajukan permohonan eksekusi obyek jaminan ke pengadilan negeri terkait. padahal, dari putusan MK tersebut hanya sekedar memperjelas tentang penafsiran cidera janji antara kreditur dan debitur.

Di dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, makna cidera janji harus disepakati bersama antara kreditur dengan debitur. apabila, debitur melakukan cidera janji dan mengakui hal tersebut serta klausul tentang cidera janji sudah tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka pihak kreditur berhak untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia tanpa melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan. sehingga, kekuatan eksekutorial yang diberikan oleh Undang Undang kepada kreditur tidak digugurkan sepanjang terdapat cidera janji seperti debitur tidak membayar angsuran dalam kurun waktu tertentu. pihak kreditur harus secara tegas

mencantumkan hak dan kewajiban debitur dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen yang akan di tanda tangani agar tidak ada debitur yang mengelak atas tuduhan melakukan cidera janji yang menyebabkan obyek jaminan fidusia di eksekusi.



Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penyelesaian permasalahan hukum terkait pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, maka dapat disimpulkan :

1. Hubungan hukum para pihak

a. Perjanjian pembiayaan konsumen (Debitur dengan FIFGROUP)

Bisnis pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh FIFGROUP selaku perusahaan pembiayaan sudah memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHPerduta).

b. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor (FIFGROUP dengan Deller)

Pihak FIFGROUP akan membayar nominal harga kendaraan ke deller dari setiap pengajuan kredit yang disetujuinya sebagai pertanda adanya transaksi jual beli yang sah (pasal 1458 KUHPerduta).

c. Perjanjian jual beli bersyarat (Deller dengan Debitur)

Pihak ketiga (FIFGROUP) menjadi syarat mutlak demi berlangsungnya transaksi jual beli antara deller dengan debitur. syarat tersebut merupakan suatu bagian yang khusus dari perjanjian itu sendiri (perikatan bersyarat diatur dalam pasal 1253 KUHPerduta).

d. Perjanjian jaminan fidusia (FIFGROUP dengan debitur)

Dalam proses pembuatan dan penandatanganan akta jaminan fidusia para pihak tidak hadir secara langsung di hadapan notaris. sedangkan, syarat pembuatan suatu akta adalah dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat yang berwenang mengenai suatu perjanjian (pasal 1868 KUHPerduta).

e. Perjanjian kerjasama dalam pembuatan akta dan pendaftaran obyek jaminan fidusia (FIFGROUP dengan Notaris)

FIFGROUP secara keseluruhan sudah membuat akta dibawah tangan berupa surat perjanjian pembiayaan dan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta jaminan fidusia (Pasal 6 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

- f. Pemberian kuasa untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia (FIFGROUP dengan *collector*)

kewenangan *collector eksternal* untuk eksekusi obyek jaminan sudah diatur dalam pasal 30 Undang Undang jaminan fidusia. seorang *collector eksternal* dapat menyalahi prosedur eksekusi obyek jaminan. jika, proses eksekusi dilakukan dengan cara memaksa dan merampas (pasal 368 KUHP).

2. Permasalahan hukum yang sering muncul di FIFGROUP

a. Kredit macet

Dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen poin 3 ayat 2, debitur yang mengalami kredit macet wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukannya. dan kreditur berhak untuk mengeksekusi obyek jaminan jika selama 2 bulan tidak ada itikad baik dari debitur untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak beserta denda.

b. Obyek jaminan fidusia dalam keadaan tidak sehat atau tidak terawat

Mesin kendaraan yang awal mulanya bersuku cadang resmi diganti dengan suku cadang bekas atau palsu sehingga rusak dan tak layak pakai. padahal, debitur berkewajiban untuk merawat obyek jaminan sampai masa kredit kendaraan bermotor telah lunas dan hal ini sudah diatur dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen poin 4 ayat 2 tentang hak dan kewajiban debitur.

c. Mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur

Mayoritas obyek yang sudah dialihkan akan mengalami penunggakan pembayaran angsuran yang berujung pada eksekusi obyek jaminan fidusia. pada dasarnya, pengalihan obyek jaminan fidusia telah melanggar perjanjian pembiayaan konsumen poin 4 ayat 3 dan pasal 23 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3. Penyelesaian permasalahan hukum di FIFGROUP

Metode penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam hal obyek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga dilakukan dengan cara negosiasi mengenai kesanggupan debitur untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak. apabila, selama 2 bulan keterlambatan tersebut belum dibayar FIFGROUP memberi kuasa kepada pihak *collector eksternal* untuk melakukan

eksekusi obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan pihak ketiga. dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan sepanjang makna cidera janji telah disepakati bersama antara kreditur dengan debitur yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen.

Saran

1. Bagi pemerintah hendaklah mempermudah prosedur penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan untuk memberi efek jera kepada debitur yang melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia. sehingga, bukan hanya sanksi keperdataan yang diterima oleh debitur melainkan juga sanksi pidana dengan implementasi peraturan perundang undangan yang tegas.
2. Bagi debitur hendaklah tidak melakukan cidera janji salah satunya dengan cara tidak mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur yang pada dasarnya sudah diatur dalam pasal 23 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Bagi kreditur dalam hal pembuatan klausul perjanjian pembiayaan konsumen hendaklah ditulis secara rinci mengenai langkah yang dilakukan kreditur apabila debitur melakukan cidera janji yaitu adanya kunjungan penagihan jika debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran diatas 4 hari, adanya surat somasi yang ditujukan ke debitur jika keterlambatan pembayaran angsuran diatas 1 bulan, dan dilakukannya eksekusi obyek jaminan fidusia jika keterlambatan pembayaran angsuran diatas 2 bulan. serta, dalam melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia hendaklah FIFGROUP beserta relasinya berpegang teguh pada kode etik dan prinsip moralitas agar tidak di katagorikan sebagai tindak pidana perampasan.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan Zaenal Asikin.2014.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali pers, Hal 67
- H.Salim,2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*.Jakarta,Rajawali Pers, hal. 55
- Handri Raharjo,2009.*Hukum Perjanjian di Indonesia*,Yogyakarta Penerbit Pustaka Yustisia, hal 81
- Johnny Ibrahim.2006.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang.Bayumedia, hal 162.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*.Penerbit Alumni.Bandung, hal 24
- Muhamad Djumhana,1996.*Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, hal. 248
- Munir Fuadi, 2013. *Hukum Jaminan Utang II*. Erlangga.Jakarta, hal.102
- Prof Purwahid Patrik dan Kashadi, 2001. *Hukum Jaminan*.UNDIP.Semarang, hal 36
- Prof Subekti, 2008. *hukum perjanjian*,bandung.Intermasa, hal 45
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 271
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji.1998.*Penelitian Hukum Normatif*.Jakarta.Raja Grafindo, hal 12
- Sophar Maru Hutagalung, 2013. *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*,Jakarta, sinar grafika, hal 66
- Supardi.2005.*Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*.Yogyakarta.UII Press, hal 28
- Tan Kanelo, 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung Alumni, hal 188

Jurnal Hukum

- Bhatara Surya. *Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Obyek Jaminan Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan (studi bank perkreditan rakyat)*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal 15-19 diakses tanggal 14 oktober 2019
- Jatmiko Winarno. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. <http://journal.unisla.ac.id/pdf/15112013/5>, Jurnal Independen Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, hal 5 diakses tanggal 7 agustus 2019
- Kusumastuti Indri Hapsari. *Kajian Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia*, <https://media.neliti.com/media/publications/213272>, Jurnal Repertorium Volume IV No. 1, Januari-Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal 2 diakses tanggal 5 agustus 2019
- Lidya Mahendra, R.A Retno, Putu Gede Arya Sumertayasa, *Perlindungan hak hak kreditur dalam hal adanya pengalihan benda jaminan oleh pihak debitur*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/>, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Ilmu Kenotariatan, Universitas Udayana 2016, hal 8 diakses tanggal 1 januari 2020
- Marulak Pardede. *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham RI 2006 Jakarta) <https://www.bphn.go.id/data/documents/>, hal 21 diakses tanggal 8 agustus 2019
- Maharani Oktora. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Atas Obyek Piutang DI Bank (tesis Universitas Indonesia)*. <http://lib.ui.ac.id/file>, hal 47 diakses 7 januari 2020
- M Yasir. *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*. journal.uinjkt.ac.id, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, Volume 3 Nomor 1, April 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, hal 9 diakses tanggal 8 agustus 2019
- Sri Purwaningsih. *Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Studi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Tesis Universitas Diponegoro 2010)*, <http://eprints.undip.ac.id/24506/pdf>, hal 18 diakses tanggal 29 agustus 2019
- Tami rusli. *penyelesaian sengketa dalam pembiayaan konsumen melalui jasa pihak ketiga* <http://jurnal.ubl.ac.id>, Pranata Hukum volume 4 Nomor 1, Januari 2009, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hal 5-6 diakses tanggal 14 oktober 2019
- Willer Napitupulu, *kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Yang dikuasai Pihak Ketiga*, <http://jurnal.unissula.ac.id>, jurnal hukum khaira ummah, volume 12 nomor 2, juni 2017, hal 3 diakses tanggal 8 januari 2020

Perundang Undangan

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia



**FIFAstra**

motorcycle financing

**FORMULIR PERMOHONAN
PEMBIAYAAN INDIVIDU**

(selanjutnya disebut "Permohonan Pembiayaan")

No Aplikasi: **85119016061**
 Program: **RG** Promo ID: **NRG0068**
 Proses: ☐ IA ☐ SPA ☐ Regular ☒ RO ☐ New

diisi oleh Pemohon

DATA PRIBADI

Nama Lengkap (sesuai KTP): FALILAHALI LAMETA		No. KTP: 3507306802890001
Nama Panggilan: FALILAHALI LAMETA		Jenis Kelamin: <input type="checkbox"/> Laki-laki <input checked="" type="checkbox"/> Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir: MALANG / 28-02-1989		Nama Gadis Ibu Kandung: PARTIYAH
Alamat Sesuai KTP: JL SUMBER WARAS TIMUR RT003		Status: <input checked="" type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Belum Kawin <input type="checkbox"/> Cerai
ALIREJO LAWANG		Jumlah Tanggungan: 1 Orang
KEL KALIREJO KEC LAWANG RT/RW: 003 / 004		Status Rumah: <input type="checkbox"/> Sendiri <input checked="" type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> KPR <input type="checkbox"/> Dinas
Kota: KABUPATEN MALANG Kode Pos: 65216		Lama Menetap: <input type="checkbox"/> Tahun <input type="checkbox"/> Bulan
Alamat Tinggal Sekarang (lengkap): JL SUMBER WARAS TIMUR RT003 RW004 KALIREJO LAWANG		Kendaraan yang dimiliki: <input type="checkbox"/> Motor <input type="checkbox"/> Mobil
KEL KALIREJO KEC LAWANG RT/RW: 003 / 004		Pendidikan Terakhir: <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SLTP <input checked="" type="checkbox"/> SLTA <input type="checkbox"/> Akademi <input type="checkbox"/> Universitas
Kota: KABUPATEN MALANG Kode Pos: 65216		Pengguna Unit: <input checked="" type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Pasangan <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Lainnya
Telp. Rumah: 085731236113		Nama Pasangan: FALILAH6@GMAIL.COM
HP: 085731236113		Tempat/Tanggal Lahir: / /
NPWP: 085731236113		E-mail: FALILAH6@GMAIL.COM
		<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Memiliki

DATA PEKERJAAN

Tipe Pekerjaan Pemohon: <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Profesional <input checked="" type="checkbox"/> Non Karyawan		Jenis Usaha Pemohon (jika Non Karyawan): <input type="checkbox"/>
Nama Perusahaan: KLINIK KESEHATAN ADIFA		Sub Bidang usaha: <input type="checkbox"/>
Bidang usaha: BURUH/PRT		Skala Usaha: <input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Menengah <input type="checkbox"/> Kecil
Masa Kerja: 3 Tahun <input type="checkbox"/> Bulan		Lama Usaha: <input type="checkbox"/> Tahun <input type="checkbox"/> Bulan
Alamat Perusahaan: PK KERJA DI KLINIK KESEHATAN ADIFA		Kepemilikan Tempat Usaha: <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya
SBG PERAWAT LAWANG MALANG RT/RW: / /		Alamat tempat usaha: RT/RW: / /
Kota: KOTA Kode Pos: KOTA		Kota: KOTA Kode Pos: KOTA
Telepon: Ext: /		Telepon: Ext: /
Tipe Pekerjaan Pasangan: <input checked="" type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Non Karyawan		Jenis Usaha Pasangan (jika Non Karyawan): <input type="checkbox"/>
Nama Perusahaan: PEGAWAI SWASTA		Sub Bidang usaha: <input type="checkbox"/>
Bidang usaha: PEGAWAI SWASTA		Skala Usaha: <input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Menengah <input type="checkbox"/> Kecil
Alamat Perusahaan: Telp: /		Lama Usaha: <input type="checkbox"/> Tahun <input type="checkbox"/> Bulan
		Kepemilikan Tempat Usaha: <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya

DATA KEUANGAN

Sumber Pendanaan:		DATA KELUARGA DEKAT YANG DAPAT DIHUBUNGI DALAM KEADAAN DARURAT (Tidak Serumah)	
Penghasilan Pemohon: Rp. 5.000.000 /bln	GAJI	Nama: PARTIYAH	
Penghasilan Pasangan: Rp. /bln		Hubungan: IBU	
Penghasilan lain: Rp. /bln		Alamat: DAMPIT	
Pengeluaran: Rp. 3.000.000 /bln		Kota: KOTA Kode Pos: KOTA	
Buku Tabungan: <input type="checkbox"/> Ada <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	Bank: /	Telp. Rumah: - HP: 085334594985	
Kartu Kredit: <input type="checkbox"/> Ada <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	Bank: /	Pekerjaan: /	

DATA PEMBIAYAAN (diisi oleh petugas FIFAstra)

DATA STRUKTUR		Sumber Order: <input type="checkbox"/> Walk-in Dealer <input type="checkbox"/> Salesman <input type="checkbox"/> Channel <input type="checkbox"/> FIFAstra	
Harga Barang: Rp. 20.279.000	Biaya Administrasi: Rp. 775.000	Nama Dealer: KARTIKASARI 3	
Uang Muka Customer: Rp. 1.500.000	Biaya Asuransi: Rp. 713.220	Nama BPKB: FALILAHALI LAMETA	
	Pokok Hutang: Rp. 20.267.220	Object: <input checked="" type="checkbox"/> NMC <input type="checkbox"/> UMC <input type="checkbox"/> Other	Type Unit: ALL NEW
Pembayaran Uang Muka di: <input type="checkbox"/> FIFAstra <input checked="" type="checkbox"/> Dealer	Angsuran: Rp. 861.000	Warna: MERAH	<input type="checkbox"/> Indent <input checked="" type="checkbox"/> Ready Stock
Pengiriman Obyek Pembiayaan ke alamat: <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Surat <input type="checkbox"/> Lainnya		Interest Type: <input checked="" type="checkbox"/> Annuity <input type="checkbox"/> Decline <input type="checkbox"/> Seasonal TOP	36 Bulan
		Repay Type: <input checked="" type="checkbox"/> Arrear <input type="checkbox"/> Advance	

Permohonan Pembiayaan ini diajukan Pemohon kepada FIFAstra dengan didasarkan atas pernyataan-pernyataan berikut ini:

1. Segala data, informasi, dokumen, identitas diri, keterangan atau uraian sehubungan dengan Permohonan Pembiayaan ini adalah benar, valid dan menerangkan dan menyakinkan keadaan serta identitas diri Pemohon yang sebenarnya.

2. Segala penggunaan barang dan pembiayaan yang dilakukan Pemohon tidak bersumber dari dan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

PEMOHON (sesuai KTP) FALILAHALI Tanggal: 31-10-2019	COUNTER SALES RONNY ALIM Tanggal: 31-10-2019	FIELD VERIFIER EKA ANGGA Tanggal: 31-10-2019	KETERANGAN LAIN MBD 600 SALES LIA SURVEY BESOK JAM 9 PAGI
---	--	--	---

CETAKAN DIGITAL APPLICATION FORM

APL-R / VEHICLE-12

SURAT PERSETUJUAN SUAMI / ISTERI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan : PEGAWAI SWASTA
Alamat : JL SUMBER WARAS TIMUR RT003 RW004 KALIREJO LAWANG RT 003 RW 004 KEL KALIREJO KEC LAWANG

Sebagai SUAMI dengan ini memberikan persetujuan kepada ISTRI saya :

Nama : FALILAHALI LAMETA
Pekerjaan : BURUH/PRT
Alamat : JL SUMBER WARAS TIMUR RT003 RW004 KALIREJO LAWANG RT 003 RW 004 KEL KALIREJO KEC LAWANG

Untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan di bawah ini :

1. Mengajukan/mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen guna pembelian Barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 85100127661.....tertanggal 11-11-2019..... berikut dengan seluruh perubahan-perubahan dan lampiran-lampirannya ("Perjanjian Pembiayaan") dari Pemberi Fasilitas, baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau selaku kuasa bank.
2. Menjamin Barang guna menjamin/sebagai jaminan pelunasan seluruh kewajiban hutang ISTRI saya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
3. Untuk keperluan tersebut membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia ("Surat Kuasa Fidusia") berikut dokumen-dokumen lainnya serta tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan yang diuraikan pada butir 1 dan 2 diatas.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga kecuali seluruh kewajiban ISTRI saya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut telah lunas seluruhnya.

Tanggal ..01-11-2019.....
Yang memberi persetujuan,



*) coret yang tidak perlu

Pada hari ini, SENIN tanggal 11-11-2019, dibuat, disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan oleh dan di antara pihak-pihak di bawah ini:

- I. PT PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, yang dalam hal ini dilakukan oleh kantor cabangnya di MALANG 2, secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri disebut "Kreditur"; dan
- II. FALILAHALI LAMETA, pekerjaan/jabatan bertempat tinggal di JL SUMBER WARAS TIMUR RT003 RW004 KALIREJO LAWANG RT sebagaimana diterangkan dalam kartu identitas (KTP) nomor 3507306802890001 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI berkedudukan di KABUPATEN MALANG selanjutnya disebut "Debitur".

Kreditur dan Debitur, secara bersama-sama disebut "Para Pihak", sepakat dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan dengan syarat dan ketentuan umum yang dituangkan di bawah ini maupun dalam pasal demi pasal di balik halaman ini serta ketentuan khusus, bilamana ada, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini.

I. OBJEK PEMBIAYAAN

- (1) Kreditur memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur untuk pembelian Barang:

Jenis : MOTOR SMH
Merek dan tipe : HONDA / F1C02N28S2B A/T
Nomor rangka : MH1JM3137KK026552
Nomor mesin : JM31E3022229
Tahun / Warna : 2019 / MERAH
Nomor BPKB : MASIH DALAM PROSES
Aksesoris : TIDAK ADA
setiap dan seluruhnya disebut "Barang"

- (2) Penyedia Barang:

KARTIKASARI 3

II. BIAYA TERKAIT PEMBERIAN PEMBIAYAAN

■ Survey : Rp. 0
■ Asuransi : Rp. 713.220
■ Penjaminan : Rp. 0
■ Fidusia : Rp. 0
■ Provisi : Rp. 0
■ Notaris : Rp. 0
■ Administrasi : Rp. 775.000

III. STRUKTUR PEMBIAYAAN

Fasilitas pembiayaan diberikan kepada Debitur oleh Kreditur dengan struktur pembiayaan sebagai berikut:

■ Harga Produk/Jasa : Rp. 20.279.000
■ Uang Muka : Rp. 1.013.950
■ Pokok Pembiayaan : Rp. 20.267.220
■ Bunga : Rp. 10.728.780
■ Hutang Pembiayaan : Rp. 30.996.000
(TIGA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU (Rupiah)
■ Jangka Waktu Fasilitas : 36 Bulan
■ Waktu Pembayaran : 36 Kali
■ Periode Pembayaran : 11 DEC 2019 S.D 11 NOV 2022
■ Angsuran : Rp. 861.000
■ Angsuran Terakhir : Rp. 861.000
■ Tanggal Jatuh Tempo : 11

IV. DENDA DAN BIAYA LAIN

■ Denda Keterlambatan : 0,5 % /hari
■ Biaya Tagih : Rp. 25.000 /penagihan
■ Biaya Surat Ket. STNK : Rp. /surat ket.
■ Biaya Simpan BPKB : Rp. 1.000 /hari

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan aslinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Para Pihak telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Perjanjian Pembiayaan ini.

Debitur,



FALILAHALI LAMETA

Kreditur,



DWI LIANAWATI

Perjanjian Pembiayaan ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

1. PENERIMAAN FASILITAS

Dengan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan ini oleh Para Pihak, maka Para Pihak telah sah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan, karenanya dengan demikian:

1. Debitur sah menerima fasilitas pembiayaan dan menyetujui dibayarkannya kepada Penyedia Barang oleh Kreditur dengan cara yang dianggap baik oleh Kreditur. Atas penerimaan fasilitas pembiayaan tersebut, Perjanjian Pembiayaan ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
2. Debitur dengan ini menyatakan sah berhutang kepada Kreditur dan Kreditur mempunyai piutang kepada Debitur atas Hutang Pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
3. Debitur telah menerima Barang dari Penyedia Barang.

2. PEMBAYARAN ANGSURAN

1. Tanggal Jatuh Tempo merupakan batas terakhir pembayaran Angsuran, karenanya Debitur wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Temponya secara tertib dan teratur tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/ pemberitahuan oleh Kreditur dengan cara apapun.
2. Jika Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka Debitur wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
3. Pembayaran Angsuran dianggap sah dan diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau tercatat pada rekening Kreditur sebagaimana mestinya.
4. Pelunasan dipercepat dimungkinkan dengan membayar Angsuran yang belum terbayar.

3. BUNGA, DENDA, PAJAK DAN BIAYA

1. Kreditur membebankan Bunga atas Pokok Pembiayaan kepada Debitur dan wajib dibayar kepada Kreditur dalam Angsuran.
2. Debitur wajib membayar Denda atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran yang dihitung per hari dari jumlah Angsuran yang terhutang sejak saat Jatuh Temponya hingga terbayarkannya Angsuran tersebut ditambah biaya penagihan.
3. Denda wajib dibayar seluruhnya bersamaan dengan pembayaran Angsuran yang terlambat tersebut atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang ditetapkan oleh Kreditur.
4. Debitur wajib membayar Biaya Tagih atas setiap penagihan Angsuran yang dilakukan Kreditur.
5. Biaya penerbitan Surat Keterangan Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK") dikenakan untuk setiap keterangan Kreditur kepada pihak berwenang atas perpanjangan masa berlaku STNK dan/atau pelunasan pajak Barang.
6. Biaya Penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dikenakan kepada Debitur atas penyimpanan BPKB yang dihitung per hari sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
7. Kreditur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilang atau rusaknya BPKB yang masih tersimpan pada Kreditur terhitung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan Denda dan Biaya-biaya atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
8. Debitur menanggung setiap beban pajak atas Barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini maupun pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini.

4. HAK DAN KEWAJIBAN ATAS

1. Kreditur bukanlah penyedia Barang, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi Barang, baik yang terjadi pada saat penyerahan Barang dari Penyedia Barang atau pada saat pemakaian/pemanfaatan oleh Debitur.
2. Debitur berhak memakai/memanfaatkan Barang sesuai penjelasan dan/atau tata cara yang ditentukan dalam hubungan hukum antara Debitur dengan Penyedia Barang.
3. Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik seluruhnya ataupun sebagian Barang/manfaat Barang kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kreditur sebelumnya.
4. Debitur berkewajiban menyerahkan dokumen Barang, yaitu BPKB kepada Kreditur terhitung sejak diterbitkannya BPKB (bagi Kendaraan baru) atau sejak ditandatanganinya Perjanjian ini (bagi Kendaraan bekas pakai) hingga seluruh Kewajiban Debitur terhadap Kreditur lunas.

5. ASURANSI

1. Dalam hal pembiayaan ini disertai perlindungan asuransi, Debitur wajib untuk membayar biaya premi yang dibayarkannya melalui Kreditur.
2. Jika terjadi risiko, apabila klaim/tuntutan penggantian asuransi dapat dicairkan, maka Kreditur berhak sebagaimana Debitur setuju untuk menerima penggantian asuransi dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Kreditur untuk mengajukan, mengurus atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi.
3. Apabila penggantian asuransi tidak mencukupi untuk pelunasan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya maka Debitur berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasinya, demikian sebaliknya, jika terdapat kelebihan maka Debitur berhak atas kelebihan tersebut.
4. Dalam hal pembiayaan ini tidak disertai perlindungan asuransi, maka Debitur sepenuhnya menanggung segala risiko yang ada dan tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.

6. CIDERA JANJI

1. Debitur dinyatakan telah melakukan Cidera Janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :
 - a. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
 - b. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal melakukan pembayaran Angsuran selambat-lambatnya pada saat Jatuh Tempo.
 - c. Debitur dimohonkan pailit, diletakkan di bawah pengampunan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang.
 - d. Debitur melakukan Cidera Janji kepada Kreditur berdasarkan perikatan-perikatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani dengan Kreditur.
2. Dalam hal terjadi Cidera Janji, maka :
 - a. Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada Debitur, sebagaimana Debitur sepakat untuk melakukan pelunasan atas seluruh Kewajiban Debitur, untuk seketika dan sekaligus lunas.
 - b. Apabila Debitur tidak dapat melunasi Kewajiban Debitur kepada Kreditur, maka Debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan Barang beserta STNK kepada Kreditur sebagaimana Kreditur berhak mengambil atau menerima penyerahan Barang beserta STNK untuk dijualkan dengan cara-cara yang dianggap baik oleh Kreditur atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan Barang guna pelunasan seluruh/ sisa Kewajiban Debitur setelah dikurangi biaya-biaya yang terjadi.
 - c. Debitur membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari Cidera Janji, termasuk biaya yang diakibatkan penyerahan Barang.
3. Penyerahan dan penjualan Barang sebagaimana ayat 2 huruf b pasal ini tidak berarti Debitur telah melunasi Kewajiban Debitur yang masih terhutang kepada Kreditur, apabila hasil penjualan Barang tidak mencukupi pelunasan Kewajiban Debitur kepada Kreditur maka Debitur berkewajiban untuk membayar sisanya kepada Kreditur hingga seluruh Kewajiban Debitur kepada Kreditur lunas, demikian sebaliknya.

7. BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Pembiayaan ini berakhir apabila Debitur telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada Kreditur.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini, Para Pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur.

9. LAIN-LAIN

1. Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul akibat hubungan antara Debitur dengan Penyedia Barang selama Perjanjian Pembiayaan ini berlangsung tidak akan menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban Debitur dan Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.
2. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur setiap terjadi perubahan data Debitur, termasuk perubahan tempat tinggal dan/atau pekerjaan Debitur.
3. Debitur setuju bahwa berdasarkan pertimbangan Kreditur sendiri, Kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada pihak ketiga manapun.

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

MALANG, 10/12/2019

Nomor : 8510019PO00014578
Perihal : Persetujuan Pembiayaan / No. Aplikasi : 85119017438
Kepada Yth : SEKAWAN SINGOSARI
JL RAYA MONDOROKO NO.25 RT.008 RW.007 KEL. PAGENTAN KEC.SINGOSARI
MALANG

Dengan Hormat,

Dengan ini kami beritahukan, bahwa kami telah menyetujui permohonan pembiayaan dari customer:

Nama : IMROATUL IJAH
Alamat : DSN GONDOREJO RT 003 RW 004 TAMANHARJO SINGOSARI RT 003 RW 004
KEL TAMANHARJO KEC SINGOSARI
KABUPATEN MALANG PROV JAWA TIMUR

untuk pembelian 1 (Satu) unit kendaraan Motor Smh ('kendaraan') dari Saudara dengan spesifikasi sebagai berikut:

Nama di BPKB : IMROATUL IJAH
Merk / Jenis. Type : HONDA/C1M02N42L0 A/T
Harga : Rp 19,298,000
Uang Muka : Rp 3,200,000
Angsuran : Rp 715,000/1 Bulan
TOP : 36

Kami akan mencairkan dana pembelian kendaraan tersebut dan secara langsung menyerahkan kepada Saudara, apabila kendaraan tersebut diatas telah Saudara kirimkan dan diterima dengan baik oleh Customer kami tersebut. Untuk itu mohon kesediaan Saudara menyerahkan kepada kami asli kwitansi penagihan, Berita Acara Serah Terima Kendaraan, dan Surat Pernyataan Penyerahan/Pengambilan BPKB.

Persetujuan Pembelian untuk kendaraan tersebut diatas berlaku sampai dengan tanggal 09/01/2020.

Hormat kami,
PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Nama : Ferry Dwi Wardhana
Kekurangan Dokumen : Semua Lengkap
Dokumen ini dibuat secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan.

Penjual

Menerima dengan baik syarat dan ketentuan tersebut diatas

Tanggal :

Nama :

Jabatan :

Cetakan ke : 1 (Satu)

Dicetak oleh : Yanuar Okki Fadrianto

SURAT
PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE
Dengan
CV SEKAWAN MITRA ABADI
Nomor : 003/FIF/MOU/CIF/I/2019

Pada hari ini rabu tanggal empat belas bulan januari tahun dua ribu sembilan belas (14/1/2019), telah terjadi Perjanjian Kerja Sama terkait pengadaan kendaraan bermotor roda dua oleh para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Adhi dwi candra

Jabatan : BM (Branch Manager)

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT Ferderal Internasional Finance yang berkedudukan di Jalan Raya Ruko Singosari Regency blok A1-A2, singosari, malang, jawa timur. dan selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

2. Nama : Dani Nursaputro

Jabatan : PIC Deler

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku PIC Deler untuk dan atas nama CV Sekawan Mitra Abadi yang berkedudukan di Jalan Raya Mondoroko Nomor 25, Pagentan, singosari, malang, jawa timur. dan selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama selanjutnya disebut "Para Pihak", dan para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang memberikan dana pinjaman kepada perorangan atau perusahaan yang akan membeli kendaraan bermotor roda dua secara kredit.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah deler yang menjual kendaraan bermotor roda dua kepada pihak konsumen yang membutuhkan.

- c. Kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dalam menjual dan mendanai kebutuhan para pembeli kendaraan bermotor secara kredit dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut ini:

Pasal 1

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun, terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani.
2. Perpanjangan jangka waktu kerja sama ini dapat dilakukan dalam hal kedua belah pihak menyetujui dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 2

WILAYAH PEMASARAN

Dalam menjalankan penjualan kendaraan bermotor roda dua tersebut berada pada wilayah pemasaran PIHAK PERTAMA yaitu Kabupaten dan Kota Malang.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan proses pendanaan secara cepat atas setiap calon debitur yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA untuk setiap kali terjadi transaksi, dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah calon debitur yang diajukan PIHAK KEDUA disetujui oleh PIHAK PERTAMA, dan seluruh data debitur, aplikasi, tanda terima kendaraan, serta faktur telah diserahkan dan diterima baik dan lengkap oleh PIHAK PERTAMA.
3. Jumlah uang yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sejumlah uang yang sama dan sesuai dengan jumlah yang tertera pada faktur dengan terlebih dahulu dikurangi DP (Down Payment) yang dilakukan oleh konsumen.
4. PIHAK PERTAMA akan menempatkan salah satu karyawan dengan jabatan CS (counter sales) pada *outlet* PIHAK KEDUA untuk membantu menjalankan proses transaksi pembiayaan konsumen.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA wajib memberikan dokumen yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA dengan tepat waktu, lengkap, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur oleh PIHAK PERTAMA.
2. Apabila PIHAK KEDUA berselisih dengan konsumen, maka PIHAK KEDUA wajib dengan segera menyelesaikan perselisihan tersebut sampai tuntas tanpa melibatkan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan ketentuan yang berlaku khususnya mengenai peraturan tentang perlindungan konsumen dalam hal penukaran kendaraan, pengembalian kendaraan atau uang, masalah pelayanan, masalah harga, dan lain-lain.
4. PIHAK KEDUA wajib menjaga nama baik PIHAK PERTAMA maupun nama baik PIHAK KEDUA dalam hal penjualan kendaraan PIHAK KEDUA maupun saat berlangsungnya perjanjian pembiayaan secara mengangsur antara PIHAK PERTAMA dengan debitur yang pembelianya diperoleh dari PIHAK KEDUA

Pasal 6

LARANGAN

1. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan meminta atau mengambil uang pembayaran angsuran dari debitur apabila debitur keliru melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA secara sengaja atau tidak sengaja menyerahkan uang pembayaran kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan melakukan pembatalan persetujuan pembiayaan secara sepihak kepada PIHAK KEDUA tanpa adanya alasan yang logis setelah pengiriman kendaraan bermotor di kediaman debitur.

Pasal 10

SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA melanggar salah satu dari ketentuan yang ada pada perjanjian ini, atau PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab dengan menerima segala resiko dikemudian hari.
2. Adanya kelalaian tersebut tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk melakukan tindakan upaya hukum lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA.

SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

NOMOR .851001276619.....

Pada hari ini ..**SENIN**..... tanggal ..**11-11-2019**..... dibuat dan ditandatangani Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut "Perjanjian" oleh dan di antara pihak-pihak di bawah ini:

I. **FALILAHALI LAMETA**....., pekerjaan/jabatan bertempat tinggal di **JL SUMBER WARAS TIMUR RT003 RW004 KALIREJO LAWANG RT 003 RW**..... sebagaimana diterangkan dalam kartu identitas (KTP) nomor **3507306802890001**..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIRI SENDIRI**..... berkedudukan di **KABUPATEN MALANG**..... dan telah mendapat persetujuan dari selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa".

Dengan ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

II. PT **FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE**..... selanjutnya disebut "Penerima Kuasa";

KHUSUS

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum di bawah ini:

Membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia, bila dipandang perlu oleh Penerima Kuasa berdasarkan pertimbangan mitigasi risikonya sendiri, termasuk perubahannya di hadapan Notaris serta mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya sebagai jaminan pelunasan pembiayaan atas nama:

Nama : **FALILAHALI LAMETA**
 Alamat : **JL SUMBER WARAS TIMUR RT003 RW004**
RT 003 RW 004 KEL KALIREJO KEC
 NIK/SIM : **3507306802890001**

selanjutnya disebut "Debitur"

yang telah disepakati antara Penerima Kuasa dan Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor **.851001276619**

Dalam hal Pemberi Kuasa memberikan penjaminan atas pelunasan hutang Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan antara Debitur dengan Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa selaku Penjamin dengan tegas melepaskan semua hak istimewa maupun pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh peraturan perundangan kepada Penjamin, khusus tetapi tidak terbatas pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Barang jaminan yang dijaminan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa secara fidusia, berupa kendaraan bermotor sebagai berikut:

Jumlah : **1**
 Jenis : **MOTOR SMH**
 Merek dan tipe : **HONDA / F1C02N28S2B A/T**
 Nomor rangka : **MH1JM3137KK026552**
 Nomor mesin : **JM31E3022229**
 Tahun / Warna : **2019 / MERAH**
 Nomor BPKB : **MASIH DALAM PROSES**
 Aksesoris : **TIDAK ADA**
 setiap dan seluruhnya disebut "Barang Jaminan"
 Nilai Penjaminan : RP **25.334.025**

Untuk keperluan tersebut di atas Penerima Kuasa berwenang menghadap, bilamana perlu, instansi dan/atau pejabat yang berwenang, membuat, menandatangani, memberikan keterangan, menyerahkan semua dan setiap surat dan/atau dokumen termasuk permohonan pendaftaran jaminan fidusia, pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan pendaftaran atas perubahan jaminan fidusia, jika terdapat perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, serta melakukan perbuatan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan hingga selesai tindakan yang dikuasakan dalam Surat Kuasa ini, tanpa ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas dan dengan demikian Surat Kuasa ini tidak dapat ditarik/dicabut hingga berakhirnya masa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini. Mengenai pemberian kuasa ini, Pemberi Kuasa melepaskan ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Para Pihak telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Surat Kuasa ini.

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Debitur,

FALILAHALI LAMETA

DWI LIANAWATI

FALILAHALI LAMETA

CETAKAN DIGITAL APPLICATION FORM

SKPJF-V-16

SURAT
PENUNJUKAN NOTARIS
PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
KEPADA
Liana Maria Fatikhatun

Nomor : 011/FIF/MOU/CIF/1/2019

Pada hari ini, Senin, dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas (21-01-2019), kami, PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Perusahaan Pembiayaan dan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan TB Simatupang Kav. 15, Jakarta Selatan 12440 ("Perseroan") yang dalam hal ini diwakili oleh AMARAH LAUT, Collateral and Insurance Department Head, bertindak untuk dalam jabatannya tersebut atas nama Perseroan, selanjutnya dalam Surat Penunjukan Notaris ini ("Surat") disebut "FIFGROUP";

dengan ini menunjuk:

Liana Maria Fatikhatun, Notaris, berkedudukan di Malang, dengan wilayah jabatan Jawa Timur, selanjutnya dalam Surat ini disebut "Notaris", sebagai Notaris rekanan FIFGROUP, sebagaimana Notaris dengan ini menerima penunjukan sebagai Notaris rekanan FIFGROUP tersebut, pada Kantor Cabang FIFGROUP Malang 2.

dengan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan terkait langsung dengan penunjukan ini, melakukan hal-hal yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- (1) membuat Akta Jaminan Fidusia;
- (2) melakukan pengurusan pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia;
- (3) membayarkan biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ke instansi yang berwenang;
- (4) menerima dan menyimpan bukti setor biaya pendaftaran Jaminan Fidusia;
- (5) mengambil Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkan Sertifikat Fidusia kepada FIFGROUP;
- (6) melakukan perbaikan data dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (bilamana ada); dan
- (7) melakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.

Selanjutnya Notaris sepakat dan mengikatkan diri kepada FIFGROUP untuk melaksanakan penunjukan sebagai Notaris rekanan FIFGROUP dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

1. Karyawan FIFGROUP adalah Kepala Cabang, Credit Section Head Cabang, Recovery Section Head, PIC Fidusia FIFGROUP Cabang sebagaimana ternyata dalam Lampiran dan/atau kuasanya yang khusus ditunjuk oleh FIFGROUP Head Office untuk menandatangani akta Jaminan Fidusia secara notarial dengan judul dan atau sebutan apapun, sehubungan dengan Surat pembiayaan antara FIFGROUP dengan konsumennya.
2. Konsumen FIFGROUP adalah orang-perorangan ataupun korporasi yang menerima fasilitas pembiayaan dari FIFGROUP berdasarkan Surat pembiayaan yang dibuat dan ditandatanganinya dengan FIFGROUP.
3. Hari Kerja adalah hari pada waktu mana bank-bank di Jakarta dibuka untuk menjalankan kegiatan usaha kliring.
4. Hari Kalendar adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
5. Afiliasi adalah setiap badan yang mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada dalam pengendalian bersama.
6. Surat Pembiayaan Konsumen adalah Surat pembiayaan yang dibuat oleh dan antara FIFGROUP dengan Konsumen FIFGROUP.
7. Informasi Rahasia adalah setiap data atau informasi yang dimiliki oleh FIFGROUP, baik dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud, termasuk namun tidak terbatas pada informasi berikut ini :
 - a. Rahasia Dagang yang berarti setiap informasi, termasuk namun tidak terbatas pada, data teknis atau non-teknis, formula, pola, kompilasi, program dan piranti lunak komputer, alat, gambar, proses, metode, teknik, data, daftar para pelanggan dan pemasok yang ada atau mungkin ada, dan informasi usaha lain yang (i) berasal dari nilai ekonomi, yang ada atau kemungkinan ada, agar tidak diketahui secara umum atau dapat diketahui oleh orang lain yang dapat memperoleh nilai ekonomi dari pengungkapan atau penggunaannya; dan (ii) merupakan hal pokok dari upaya FIFGROUP atau Afiliasinya yang wajar berdasarkan keadaan untuk menjaga kerahasiaannya;
 - b. Setiap dan semua informasi pelanggan yang disimpan atau diawasi oleh FIFGROUP;
 - c. Setiap dokumen kontraktual, kebijakan, rencana, prosedur, metode, rancang bangun, sistem atau proses yang digunakan oleh FIFGROUP untuk mempertahankan keamanan kegiatan usahanya;
 - d. Setiap informasi ilmiah atau teknis, rancang bangun, algoritma, proses, prosedur, formula, atau perbaikan, dan;
 - e. Setiap konsep, laporan, data, pengetahuan teknis, pekerjaan yang sedang berlangsung, rancang bangun, alat pengembangan, spesifikasi, piranti lunak komputer, kode sumber, kode obyek, bagan alur, *database*, penemuan, dan informasi, baik apakah hal tersebut di atas mungkin dipatenkan atau dilindungi hak ciptanya.
8. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benada bergerak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan perubahan-perubahannya jika ada.

9. Invoice adalah surat yang dikeluarkan untuk menagih pembayaran.

Pasal 2

LINGKUP PENUNJUKAN

1. FIFGROUP menunjuk Notaris untuk melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di atas.
2. Akta Jaminan Fidusia akan dibuat oleh Notaris dan ditandatangani bersama-sama dengan Kepala Cabang, Credit Section Head atau Recovery Section Head selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas oleh Notaris. Salinan Akta Jaminan Fidusia akan disimpan dengan baik oleh Notaris dan Karyawan FIFGROUP berhak sewaktu-waktu untuk meminta Salinan Akta Jaminan Fidusia tersebut.
3. Notaris berkewajiban untuk menyerahkan Asli Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Karyawan FIFGROUP selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas oleh Notaris.
4. Apabila pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, ditolak karena :
 - a. Kelalaian atau kesengajaan Notaris dalam membuat Akta Jaminan Fidusia, maka Notaris berkewajiban untuk membuat Akta Jaminan Fidusia baru dengan tanpa memungut biaya kepada FIFGROUP.
 - b. Sudah terdaftar objek Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka FIFGROUP akan menunjuk Notaris untuk melakukan royalti Jaminan Fidusia tersebut dan Notaris berhak untuk mendapatkan pembayaran atas royalti tersebut.
 - c. Kekurangan dokumen atau sebab-sebab lainnya kecuali sebagaimana dimaksud dalam ayat a dan b di atas, maka Notaris berkewajiban untuk berkoordinasi dengan PIC Fidusia Cabang dalam pemenuhan pendaftaran jaminan fidusia tersebut.
5. Karyawan FIFGROUP berhak untuk sewaktu-waktu melakukan pengecekan ke kantor Notaris.

Pasal 3

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PENUNJUKAN

1. Surat ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya hingga adanya suatu pernyataan tertulis dari FIFGROUP yang menegaskan berakhirnya penunjukan ini.
2. Lampaunya waktu pelaksanaan kewajiban-kewajiban Notaris berdasarkan Surat ini merupakan bukti bahwa Notaris telah cidera janji (wan prestatie) dan dengan demikian maka FIFGROUP berhak untuk mengakhiri Surat ini secara sepihak, tanpa diperlukan lagi suatu pembuktian untuk itu.
3. Berakhirnya Surat ini tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban Notaris untuk menjaga Informasi Rahasia FIFGROUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Surat ini.
4. Dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya Asli Sertifikat Jaminan Fidusia yang pada saat berakhirnya Surat sedang dalam pengurusan, Notaris berkewajiban untuk

Pasal 13
KETENTUAN LAIN

1. Surat ini dibuat dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Semua judul pasal dalam Surat ini hanya merupakan petunjuk yang digunakan untuk kemudahan saja dan oleh karenanya tidak dimaksudkan dan tidak dapat ditafsirkan sebagai pokok dari isi ketentuan pasal yang bersangkutan.
3. Dalam hal karena sebab apapun, salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan dalam Surat ini menjadi tidak berlaku dan/atau melanggar ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Surat ini masih tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK sepanjang tidak menyebabkan substansi dari Surat ini tidak dapat dilaksanakan.
4. Kecuali dinyatakan secara tegas dalam Surat ini, tidak ada satupun ketentuan di dalam Surat ini yang dimaksudkan untuk membuat masing-masing pihak dalam Surat ini dan/atau wakil-wakilnya bertindak agen atau kuasa hukum dari pihak lainnya dalam Surat ini. Kecuali dinyatakan secara khusus, tidak ada ketentuan dalam Surat ini yang memberikan pada salah satu pihak dalam Surat ini dan/atau wakil-wakilnya kewenangan untuk bertindak, mengikat, membuat dan/atau melaksanakan sesuatu kewajiban atau tanggung jawab atas nama pihak lainnya dalam Surat ini.

Surat ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada awal Surat ini, dalam 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya dan keduanya bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PT Federal International Finance
Collateral and Insurance Department



Amarah Laut
Department Head

Notaris



Liana Maria Fatikhatus

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor : 1134.-

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 27-09-2019 (dua puluh tujuh September dua ribu sembilan belas), Pukul : 10.26 (sepuluh lewat dua puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini.

- Berhadapan dengan saya, **LIANA MARIA FATIKHATUN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Malang, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang akan disebut namanya pada bagian akhir akta ini:

- I. Tuan **RIDA FAJAR UTAMA P**, lahir di Perlarian, tanggal 24-04-1994 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dusun Suhud Tengah, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Rintis, Kecamatan Silangkitang, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1406052404940006; Untuk sementara berada di Kabupaten Malang. selaku Remedial Section Head Perseroan Terbatas "**PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE**", berkedudukan di Jakarta Selatan, melalui Kantor Cabang Singosari, berkedudukan di Jalan Raya Singosari Regency Blok A1-A2, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Branch Manager PT. Federal International Finance bermeterai cukup, yang dikeluarkan di Malang tertanggal 06-05-2019 (enam Mei dua ribu sembilan belas). dari dan oleh karena itu

Penghadap bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah-----
mewakili Perseroan Terbatas "PT. FEDERAL INTERNATIONAL -----
FINANCE", berkedudukan di Jakarta Selatan dan/atau melalui -----
Kantor Cabang Singosari. -----

-Sedangkan dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak
berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia yang dibuat di --
bawah tangan, tanggal 15-09-2019 (Lima Belas September Dua Ribu --
Sembilan Belas), yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----
demikian selaku kuasa untuk dan atas nama : -----

Nyonya **PRISCA FEBRIANA PUTRI**, lahir di MALANG, pada tanggal ----
12-02-1995 (dua belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh
lima), warga negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
JALAN KEBONSARI V 49, rukun tetangga 004, rukun warga 002, -----
kelurahan/desa Kebonsari, kecamatan Sukun, Kota Malang, provinsi ----
Jawa Timur, pemegang kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor -----
3573015202950002. -----
(untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**" atau "**Pemberi Fidusia**").

II. Tuan **RIDA FAJAR UTAMA P**, lahir di Perlarian, tanggal 24-04-1994 ----
(dua puluh empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat),----
Warga Negara Indonesia, Petani/ Pekebun, bertempat tinggal-----
di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dusun Suhud Tengah, Rukun -----
Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Rintis, Kecamatan-----
Silangkitang, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1406052404940006; ----
Untuk sementara berada di Kabupaten Malang.-----

-selaku Remedial Section Head Perseroan Terbatas "**PT. FEDERAL -----
INTERNATIONAL FINANCE**", berkedudukan di Jakarta Selatan, melalui
Kantor Cabang Singosari, berkedudukan di Jalan Raya Singosari Regency

Blok A1-A2, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
berdasarkan Surat Kuasa Branch Manager PT. Federal International -----
Finance bermeterai cukup, yang dikeluarkan di Malang tertanggal 06-05-
2019 (enam Mei dua ribu sembilan belas). dari dan oleh karena itu-----
penghadap bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan -
Terbatas "PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE", berkedudukan di ----
Jakarta Selatan dan/atau melalui Kantor Cabang Singosari. -----

-(untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**" atau "**Penerima Fidusia**").

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan --
terlebih dahulu: -----

a. Bahwa diantara pemberi fidusia selaku Pihak yang menerima fasilitas ---
kredit dan penerima fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas kredit --
telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang -
dibuat dibawah tangan, nomor 851001087619, tertanggal -----
17-09-2019 (tujuh belas September dua ribu sembilan belas). -----
(untuk selanjutnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen disebut -----
"**Perjanjian Pembiayaan**").-----

b. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang --
terhutang dan harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, baik karena -
utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan --
Perjanjian Pembiayaan, dengan jumlah utang pokok sebesar Rp. -----
16.827.849,- (enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu -----
delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) atas sejumlah uang yang --
ditentukan di kemudian hari

berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka Penghadap Pihak Pertama ---
selaku Pemberi Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada -

Penerima Fidusia untuk dan atas nama Pemberi Fidusia dan Penghadap -
bertindak sebagaimana tersebut dan karenanya untuk dan atas nama ---
Penerima Fidusia dengan ini menerima Jaminan Fidusia sampai dengan -
nilai penjaminan sebesar Rp. 21.034.811,- (dua puluh satu juta tiga ----
puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) Atas obyek Jaminan ----
Fidusia berupa: -----

-Kendaraan roda 2 (dua), dengan perincian : -----

Merk : HONDA; -----

Model : MOTOR SMH; -----

Type : D1B02N26S3; -----

Tahun/Warna : 2019/HITAM; -----

Nomor Rangka : MH1JFZ136KK143925; -----

Nomor mesin : JFZ1E3142026; -----

Atas Nama BPKB : PRISCA FEBRIANA PUTRI -----

Yang bernilai Rp. 17.454.000,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh
empat ribu rupiah) dengan bukti obyek Surat Pernyataan Penyerahan BPKB ---
tertanggal(enam belas September dua ribu sembilan belas).-----
(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan "**Obyek** -----

Jaminan Fidusia") -----

- Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut -----
menerangkan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia ini diterima dan -----
dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan sebagai ---
berikut:-----

PASAL 1

-Mulai sejak ditandatanganinya akta ini, hak kepemilikan atas Obyek ----
Jaminan Fidusia telah beralih dari tangan Pemberi Fidusia ke tangan ----
Penerima Fidusia dengan ketentuan bahwa Obyek Jaminan Fidusia -----
tersebut tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia selaku Peminjam -----

Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang.-----

-Bahwa apabila dikemudian hari ternyata antara para pihak dan atau ---
pihak lainnya terjadi perselisihan atau sengketa mengenai akta yang ---
dibuat oleh para pihak ,maka para pihak membebaskan Notaris dan ----
saksi saksi dari segala tuntutan/gugatan hukum dan laporan baik -----
perdata, tata usaha Negara maupun pidana, termasuk tidak terbatas ---
pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara.-----
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Malang, pada hari dan tanggal ----
tersebut pada bagian awal Akta ini dengan dihadiri oleh : -----

- 1 Tuan FITRA FACHRI MAWAFI, lahir di Malang, tanggal 27-12-1993(dua --
puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga),Warga
Negara Indonesia, Belum / Tidak Bekerja, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Malang, Dusun Manting, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga -
003, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Pujon, Pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3507262712930004; ----
- 2) Nyonya DIAH ERNAWATI, lahir di Malang, tanggal 27-07-1986 (dua - ----
puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga-----
Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota --
Malang, Jalan Gajayana I-C/741 F, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --
002,Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3573046707860002; -----

-Untuk sementara berada di Kabupaten Malang. -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris dan dan sebagai saksi-saksi.-----

-Atas keinginan penghadap dan saksi-saksi, serta berdasarkan pasal 16
ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan -----

Notaris, akta ini tidak dibacakan oleh saya, Notaris karena penghadap --

dan saksi-saksi telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi -
akta, maka segera menghadap, para saksi dan saya Notaris -----
menandatangani. -----
-Atas permintaan menghadap, maka para menghadap dan saksi telah ----
membaca sendiri akta ini, maka segera menghadap, para saksi dan saya,
Notaris, menandatangani akta ini. -----
-Dilaksanakan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan ataupun gantian.
-Minuta akta ini bermaterai cukup dan telah ditandatangani dengan ----
secukupnya.-----



RIDA FAJAR UTAMA P

FITRA FACHRI MAWAFI

DIAH ERNAWATI

LIANA MARIA FATIKHATUN, S.H., M.Kn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA**

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

NOMOR : W15.00984268.AH.05.01 TAHUN 2019

TANGGAL : 07-10-2019 JAM : 16:42:10

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : RIZKI FEBIANSYAH Alamat : JALAN DR CIPTO GANG III, RT 001, RW 002, DESA/KELURAHAN BEDALI, KECAMATAN LAWANG, KABUPATEN/KOTA MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR, KODE POS 65215	Nama : PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Alamat : JAKARTA SELATAN, MELALUI KANTOR CABANG SINGOSARI, BERKEDUDUKAN DI JALAN RAYA SINGOSARI REGENCY BLOK A1-A2, DESA/KELURAHAN PAGENTAN, KECAMATAN SINGOSARI, KABUPATEN/KOTA MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR, KODE POS 65153

Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang **AGUS SUPRIYANTO** sejumlah Rp. 16.831.449,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)

Berdasarkan perjanjian Pembiayaan Multiguna-Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor 851001088419, Tanggal 24 September 2019

Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 21.039.311,00 (dua puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah)

Obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 391, tanggal 5 Oktober 2019 yang dibuat Notaris LIANA MARIA FATIKHATUN, S.H., M.KN. berkedudukan di JAWA TIMUR.



a.n. PIt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA a.n.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Dr. Susy Susilawaty, SH., MH.
(19600102 198203 2 001)

Sertifikat Jaminan Fidusia ini di proses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10/7/2019

https://fidusia.ahu.go.id/app/form_lampiran_obyek.php?id=2019100735104103

LAMPIRAN KETERANGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA

NOMOR SERTIFIKAT : W15.00984268.AH.05.01 TAHUN 2019

Kategori Obyek	: Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Dua)
Merk	: HONDA
Tipe	: D1B02N26S3
No. Rangka	: MH1JFZ131KK482186
No. Mesin	: JFZ1E3482095
Bukti Obyek	: Surat Pernyataan Penyerahan BPKB , tertanggal 24-09-2019
Nilai Obyek	: IDR 17.454.000,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)



https://fidusia.ahu.go.id/app/form_lampiran_obyek.php?id=2019100735104103

1/1



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA**

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

NOMOR : W15.00984270.AH.05.01 TAHUN 2019


TANGGAL : 07-10-2019 JAM : 16:42:28

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : RUSTIANA NUR NIMAH Alamat : PERUM BUMI MONDOROKO RAYA BLOK A1 NOMOR 51 A, RT 003, RW 013, DESA/KELURAHAN WATUGEDE, KECAMATAN SINGOSARI, KABUPATEN/KOTA MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR, KODE POS 65153	Nama : PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Alamat : JAKARTA SELATAN, MELALUI KANTOR CABANG SINGOSARI, BERKEDUDUKAN DI JALAN RAYA SINGOSARI REGENCY BLOK A1-A2, DESA/KELURAHAN PAGENTAN, KECAMATAN SINGOSARI, KABUPATEN/KOTA MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR, KODE POS 65153
Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang YUDHA DWI KRISTANTO sejumlah Rp. 20.469.380,00 (dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) Berdasarkan perjanjian Pembiayaan Multiguna-Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor 851001087719, Tanggal 24 September 2019 Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 25.586.725,00 (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)	
Obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 389, tanggal 5 Oktober 2019 yang dibuat Notaris LIANA MARIA FATIKHATUN, S.H., M.KN. berkedudukan di JAWA TIMUR.	



a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA a.n.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR


Dr. Susy Susilawaty, SH., MH.
(19600102 198203 2 001)

Sertifikat Jaminan Fidusia ini di proses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN KETERANGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA

NOMOR SERTIFIKAT : W15.00984270.AH.05.01 TAHUN 2019

Kategori Obyek	: Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Dua)
Merk	: HONDA
Tipe	: F1C02N28S2B A/T
No. Rangka	: MH1JM312XKK918088
No. Mesin	: JM31E2910431
Bukti Obyek	: Surat Pernyataan Penyerahan BPKB , tertanggal 24-09-2019
Nilai Obyek	: IDR 20.279.000,00 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)



SURAT PERNYATAAN JANJI BAYAR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
Alamat
No KTP
Nomor Perjanjian

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya telah melakukan cidera janji dengan tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan No....., yaitu terlambat melakukan pembayaran angsuran.
2. Bahwa saya bersedia membayar semua tunggakan kewajiban saya sesuai dengan perjanjian pembiayaan No..... yang telah saya tanda tangan sebelumnya dengan data sebagai berikut :
Nomor Perjanjian/ Atas Nama :
Angsuran Ke :
Jatuh Tempo :
Total Rencana Bayar :
3. Bahwa dengan ini saya berjanji untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan total rencana bayar yang telah saya tulis diatas pada hari.....tanggal.....tahun.....
4. Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang sudah tertulis tersebut diatas saya belum dapat melaksanakan, maka saya bersedia untuk melunasi seluruh sisa hutang saya atau saya bersedia mengembalikan unit barang jaminan atas kontrak tersebut dengan sukarela kepada pihak PT Federal International Finance Cabang Malang 2.
5. Bahwa apabila saya tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab atas konsekuensi hukum menurut hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di :
Tanggal :

Yang membuat pernyataan

(.....)



Surat Pernyataan.

Nama : SARJONO

Alamat : Pondok Muliara Blok #2/105 Dengkel.

No Kon. : 851 000 302 619

Dengan ini : Saya Menyatakan, bila memang nyunt
Saya cadangkan sebesar 4.000.000. Keluar dari.

Arif. Saya memohon, kepada pihak

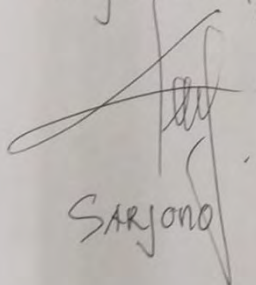
fif untuk dapat membantu penubuhan
nyunt. ke saudara Arif sebesar 1.000.000

di kembalikan. Uang saya. Untuk menebus nyunt

Maaf belum cukup. Karena : Kesadahan isteri saya
lalu sakit

Dengan ini Surat Pernyataan saya buat di Sekeloa² y
dan saya memohon sebesar lagi untuk pihak fif
dapat membantu dan akan saya kembalikan
nyunt tersebut

Singosari, 24/01/2020.


SARJONO

SURAT KUASA

Nomor : FIF-MLG2/LIT/SK/1/I/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

ADHIE CHANDRA K.W , Kepala Cabang PT. Federal International Finance (Perseroan) Cabang MALANG2. Bertindak untuk dan atas nama perseroan, berkedudukan di JL.RAYA REGENCY BLOK A1-A2-SINGOSARI, selanjutnya disebut **"PEMBERI KUASA"**

Dengan ini memberi kuasa kepada :

JOHAN SIAHAYA, Mitra Kerja Perseroan yang bertempat tinggal di JL ,MAYJEND SUNKONO VII/43 RT 004/RW003 KEL BURING KEC. KEDUNGKANDANG ,pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3573030609770005 , selanjutnya disebut **"PENERIMA KUASA"**

KHUSUS

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas nama

SITI JULAIKA

05/31/19

Untuk dan atas nama serta guna kepentingan dari PEMBERI KUASA melakukan pengambilan kembali Barang Jaminan / kendaraan dengan atau tanpa bantuan pihak yang berwajib, dengan spesifikasi sbb :

No. Kontrak : 851000663419
Merk/Type : NC11BF1D A/T
No. Rangka : MH1JFD226DK041391
No. Mesin : JFD2E2032664
No. Polisi : N4761GM

Alamat Sesuai KTP : DSN KALIANYAR RT02 RW05 SIDODADI

Alamat Penagihan : DSN KALIANYAR RT02 RW05 SIDODADI

Menyerahkan Barang Jaminan / kendaraan tersebut ke kantor Perseroan atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh PEMBERI KUASA selambat-lambatnya 1 x 24 jam. PENERIMA KUASA tidak diperkenankan untuk menerima bentuk pembayaran apapun secara langsung dari customer PT. Federal International Finance.

Mengenai hal tersebut diatas PENERIMA KUASA berkewajiban menjalankan kuasa ini sesuai dengan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di Indonesia, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum dan norma-norma tersebut, maka PENERIMA KUASA bertanggung jawab secara pribadi terhadap tuntutan yang timbul di kemudian hari.

Demikian kuasa ini diberikan tanpa "Hak Substitusi", berlaku selama 14 (Empat belas) hari sejak Surat Kuasa ini ditandatangani atau adanya pencabutan.

MALANG, 06 January 2020

PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

ADHIE CHANDRA K.W

JOHAN SIAHAYA







